



INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

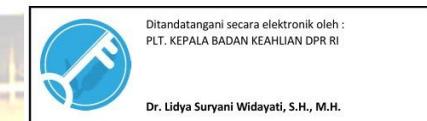
KEGIATAN

Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025

(10 - 24 Juli 2025)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DIKELOLA OLEH:

TIK SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.



DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	2
KOMISI II	3
A. FUNGSI LEGISLASI	3
B. FUNGSI ANGGARAN	6
C. FUNGSI PENGAWASAN	7
KOMISI III	12
A. FUNGSI LEGISLASI	12
B. FUNGSI ANGGARAN	14
C. FUNGSI PENGAWASAN	15
KOMISI IV	17
A. FUNGSI LEGISLASI	17
B. FUNGSI ANGGARAN	17
C. FUNGSI PENGAWASAN	19

KOMISI V	21
A. FUNGSI LEGISLASI	21
B. FUNGSI ANGGARAN	21
C. FUNGSI PENGAWASAN	24
KOMISI VI	25
A. FUNGSI LEGISLASI	25
B. FUNGSI ANGGARAN	26
C. FUNGSI PENGAWASAN	26
KOMISI VII	28
A. FUNGSI LEGISLASI	28
B. FUNGSI ANGGARAN	28
C. FUNGSI PENGAWASAN	28
KOMISI VIII	31
A. FUNGSI LEGISLASI	31
B. FUNGSI ANGGARAN	31
C. FUNGSI PENGAWASAN	32
KOMISI IX	33
A. FUNGSI LEGISLASI	33

B. FUNGSI ANGGARAN	33
C. FUNGSI PENGAWASAN	34
KOMISI X	41
A. FUNGSI LEGISLASI	41
B. FUNGSI ANGGARAN	41
C. FUNGSI PENGAWASAN	48
KOMISI XI	51
A. FUNGSI LEGISLASI	51
B. FUNGSI ANGGARAN	51
C. FUNGSI PENGAWASAN	69
KOMISI XII	71
A. FUNGSI LEGISLASI	71
B. FUNGSI ANGGARAN	71
C. FUNGSI PENGAWASAN	72
KOMISI XIII	76
A. FUNGSI LEGISLASI	76
B. FUNGSI ANGGARAN	76
C. FUNGSI PENGAWASAN	78

BADAN LEGISLASI	79
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	82
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	89
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	91
BADAN ANGGARAN	93
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	94
BADAN ASPIRASI MASYARAKAT	100

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Kunjungan Panja Penyiaran Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 10-12 Juli 2025.	Mendapatkan masukan terhadap Perumusan Pembahasan RUU Penyiaran.	
		Rapat Intern Panja Penyiaran Komisi I DPR RI dengan Tim Asistensi Setjen dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.	Penyampaian presentasi Tim Asistensi Setjen DPR RI terkait perkembangan penyusunan NA dan RUU Penyiaran.	
		RDPU Panja Penyiaran Komisi I DPR RI dengan Kadin, Sahabat Peradaban Bangsa (SPB) dan Asosiasi Konten Kreator Seluruh Nusantara (AKKSI) dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024 pukul 13.00 WIB.	Mendapatkan masukan terhadap Perumusan Pembahasan RUU Penyiaran.	
		RDPU Panja Penyiaran Komisi I DPR RI dengan penyelenggaran <i>Multiplatform</i> (Youtube Asia Tenggara, Meta dan Tiktok) dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025.	Mendapatkan masukan terhadap Perumusan Pembahasan RUU Penyiaran.	
		RDPU Panja Penyiaran Komisi I DPR RI dengan para Pakar/Akademisi (Prof. Dr. Ahmad M Ramli, SH., MH, FCBArb; Prof. Dr. rer. Soc. Masduki, S.AG., M.Si., MA; Dr. Ignatius Haryanto Djoewanto) dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025.	Mendapatkan masukan terhadap Perumusan Pembahasan RUU Penyiaran.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kemlu	Courtesy Call dengan Dubes Suriah dilaksanakan pada tanggal 15 juli 2025.	Terkait pembicaraan hubungan bilateral Antara Indonesia-Suriah.	
2.	Kemhan/ TNI	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI Ke Universitas Pertahanan dan Kodiklat TNI dilaksanakan pada tanggal 17-19 Juli 2025.	Unhan: Peran strategis Unhan dalam mendidik pemimpin masa depan di bidang pertahanan dan keamanan dalam menghadapi kompleksitas tantangan multidomain dan era teknologi disruptif Kodiklat TNI: Kodiklat TNI sebagai pusat inovasi doktrin dan pendidikan militer dalam menghadapi spektrum tantangan masa kini dan masa depan	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Kabupaten/Kota	Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum mewakili Menteri Hukum RI, dan Ketua Komite I DPD RI, dengan agenda pembicaraan Tingkat I Pembahasan 10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota dengan susunan sebagai berikut: pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah, dan pembentukan Panja, pada hari Rabu 16 Juli 2025.	1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan pendapat/pandangan dari Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite I DPD RI terhadap 10 (sepuluh) RUU tentang Kab/Kota, yaitu: 1) RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo; 2) RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo; 3) RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara; 4) RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara; 5) RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara; 6) RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara; 7) RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara; 8) RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara; 9) RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara; dan	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			10) RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara. 2. Pemerintah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI dan akan dibahas dalam Panja. 3. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Panja Pembahasan 10 (sepuluh) RUU tentang Kab/Kota tersebut.	
2.	RUU tentang Kabupaten/Kota	Kunjungan Kerja Panja Pembahasan 10 RUU tentang Kabupaten/Kota ke Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Gorontalo, tanggal 17 – 19 Juli 2025.	Menerima pandangan, masukan, serta permasalahan yang mereka hadapi terkait dasar hukum pembentukan 10 kabupaten/kota tersebut.	
3.	RUU tentang Kabupaten/Kota	Rapat Panja Pembahasan 10 RUU tentang Kabupaten/Kota dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, Kementerian Hukum RI, dan Komite I DPD RI, dengan agenda membahas DIM RUU terkait penyesuaian alas hukum, pada hari Senin, 21 Juli 2025.	Rapat dilaksanakan secara tertutup	
4.	RUU tentang Kabupaten/Kota	Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Pembahasan 10 RUU tentang Kabupaten/Kota dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, Kementerian Hukum RI, dan Komite I DPD RI, dengan agenda merumuskan	Rapat dilaksanakan secara tertutup	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dan mensinkronisasi draf 10 (sepuluh) RUU Kabupaten/Kota, pada hari Senin, 21 Juli 2025.		
5.	RUU tentang Kabupaten/Kota	Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Pembahasan 10 RUU tentang Kabupaten/Kota dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, Kementerian Hukum RI, dan Komite I DPD RI, dengan agenda merumuskan dan mensinkronisasi draf 10 (sepuluh) RUU Kabupaten/Kota, pada hari Selasa, 22 Juli 2025.	Rapat dilaksanakan secara tertutup	
6.	RUU tentang Kabupaten/Kota	Rapat Panja Pembahasan 10 RUU tentang Kabupaten/Kota dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, Kementerian Hukum RI, dan Komite I DPD RI, dengan agenda laporan timus dan timsin ke Panja, pada hari Selasa, 22 Juli 2025.	Rapat dilaksanakan secara tertutup	
7.	RUU tentang Kabupaten/Kota	Rapat Intern Komisi II DPR RI, dengan agenda laporan Panja 10 (sepuluh) RUU tentang Kabupaten/Kota ke	Rapat dilaksanakan secara tertutup	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Komisi II, pada hari Selasa, 22 Juli 2025.		
8.	RUU tentang Kabupaten/Kota	Rapat Kerja Tingkat I ke-2 Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI, Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan Kementerian Hukum RI, dan Komite I DPD RI, dengan agenda pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota dengan susunan sebagai berikut: pengantar ketua rapat, pendapat akhir mini fraksi-fraksi, DPR, dan Pemerintah, pengambilan keputusan, dan penandatanganan draft RUU, pada hari Rabu, 23 Juli 2025.	<p>Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui dan menandatangani draf 10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo;2. RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo;3. RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara;4. RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara;5. RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara;6. RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara;7. RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara;8. RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara;9. RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara; dan10. RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian ATR/BPN	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan undang-undang;b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atauc. Kebijakan pemerintah. <p>Kunjungan Kerja Panja tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor Pertanahan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, tanggal 11 – 13 Juli 2025.</p>		
2.	<ul style="list-style-type: none">a. Kementerian Dalam Negerib. KPUc. Bawaslud. DKPP	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan undang-undang;b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atauc. Kebijakan pemerintah. <p>Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membahas persiapan dan kesiapan Pemilihan ulang Walikota Pangkal Pinang dan Bupati Bangka,</p>	<ul style="list-style-type: none">1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan paparan dan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) RI terkait persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Ulang di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka, serta Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara, dan juga evaluasi PSU Pilkada. Komisi II DPR RI mengapresiasi langkah persiapan yang sudah dilakukan oleh Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI. Dalam rangka memastikan Pilkada Ulang dan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		membahas persiapan dan kesiapan PSU di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara, dan evaluasi PSU Pemilihan Kepala Daerah, hari Senin, 14 Juli 2025.	<p>PSU dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Komisi II DPR RI :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mendorong Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, untuk memastikan kesiapan logistik secara optimal dalam mendukung proses Pilkada Ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung dan PSU di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara.b. Mendorong Kemendagri untuk memastikan ketersediaan anggaran 100% untuk penyelenggaraan Pilkada Ulang di Kota Pangkal Pinang.c. Meminta KPU Daerah agar lebih hati-hati dalam menjalankan semua tahapan Pilkada Ulang dan PSU berkaitan dengan kelengkapan pemenuhan persyaratan administrasi pasangan calon dan teknis penyelenggaraan tahapan, serta meminta Bawaslu Daerah meningkatkan kinerja pengawasan dengan integritas setiap tahapan PSU sehingga tidak terjadi gugatan berulang.d. Meminta Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan Bawaslu RI agar meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan, khususnya TNI dan Polri untuk memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban serta meminimalisasi potensi konflik selama pelaksanaan Pilkada Ulang dan PSU.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2. Komisi II DPR RI menyoroti pelaksanaan PSU di 22 daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya, bahwa masih terdapat dugaan praktik politik uang, pelanggaran terhadap prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur negara lainnya, netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, serta keterlibatan aparat desa di beberapa daerah yang menyebabkan beberapa hasil PSU kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Untuk mengantisipasi potensi hasil PSU kembali digugat ke MK RI, Komisi II DPR RI meminta agar KPU dan Bawaslu di daerah benar-benar menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
3.	<p>a. Kementerian ATR/BPN b. Korban Penggusuran Lahan Warga Panunggangan Barat (Kplw-Panbar) c. Aliansi Komando Aksi Rakyat Provinsi Lampung</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Staf Khusus Menteri, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN,</p>	<p>1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan dan memahami pengaduan masyarakat dari Perwakilan Korban Penggusuran Lahan Warga Panunggangan Barat (KPLW-PANBAR), Perwakilan Aliansi Komando Aksi Rakyat Provinsi Lampung (AKAR).</p> <p>2. Untuk kasus warga Panunggangan Barat Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN membantu warga mendapatkan alas hak dan bukti lainnya termasuk surat pernyataan penguasaan fisik dengan itikad baik menurut Peraturan Perundang – undangan yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dirjen Pengendalian dan Penetapan Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Provinsi Banten, Kanwil BPN Provinsi Lampung, Kantah Kota Tangerang, Kantah Kabupaten Tulang Bawang, Kantah Kabupaten Lampung Utara, Korban Penggusuran Lahan Warga Panunggangan Barat (Kplw-Panbar), dan Aliansi Komando Aksi Rakyat Provinsi Lampung, dengan agenda audiensi terkait permasalahan pertanahan, hari Selasa, 15 Juli 2025.	<p>segera mendapatkan uang ganti rugi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang.</p> <p>3. Untuk permasalahan yang disampaikan Aliansi Komando Aksi Rakyat Provinsi Lampung (AKAR), Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN melakukan penetapan dengan melakukan inventarisasi, identifikasi, dan pengukuran ulang terhadap seluruh area HGU milik PT SGC Group di Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang agar tidak terjadi lagi konflik antara perusahaan dan masyarakat serta negara mendapatkan penerimaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.</p>	
4.	Kementerian Dalam Negeri RI	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan undang-undang;b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atauc. Kebijakan pemerintah. <p>Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan agenda pembinaan dan pengawasan</p>	<p>Setelah mendengar paparan dan penjelasan Menteri Dalam Negeri RI terhadap pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka Komisi II DPR RI:</p> <p>1. Mendorong Menteri Dalam Negeri RI untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam urusan pembinaan, pengawasan, pengangkatan, pemberhentian, pembentukan hingga persetujuan pembubaran BUMD agar berjalan lebih efektif, efisien, terarah, dan akuntabel, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan lainnya.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia, hari Rabu, 16 Juli 2025.	<ol style="list-style-type: none">2. Terhadap regulasi terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral dan tidak terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, serta lemahnya pengawasan dan pembinaan, Komisi II DPR RI mendorong kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri RI untuk mendorong Pemerintah Daerah menyusun <i>Grand Design Pengembangan BUMD</i> berbasis <i>good corporate governance</i> sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).4. Komisi II DPR RI mendorong percepatan pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di bawah Menteri Dalam Negeri RI yang memiliki kewenangan teknis, kelembagaan, sistem pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD secara nasional.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana	Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tanggal 10 Juli 2025	Membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).	--
2.		Rapat Timus dan Timsin Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tanggal 11 Juli 2025.	Merumuskan dan Mensinkronisasikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Hasil Panja RUU KUHAP.	
3.		RDPU Komisi III DPR RI tanggal 14 Juli 2025 dengan: 1. Ketua Komnas Perempuan; 2. Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) beserta Jajaran; 3. Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia; 4. Dewan Pengawas Lembaga Bantuan Hukum Gema Keadilan.	Menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	
4.		RDPU Komisi III DPR RI dengan Solidaritas Advokat Untuk Kebenaran dan Anti Kriminalisasi (SAKSI) tanggal 16 Juli 2025.	Menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait kasus Impunitas Advokat dan Advokat yang dikriminalisasi dalam menjalankan tugasnya.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana	Rapat Timus dan Timsin Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tanggal 16 Juli 2025.	Perapihan Batang Tubuh dan Penjelasan oleh Tim Teknis Timus dan Timsin RUU KUHAP.	
6.		Siaran Pers Komisi III DPR RI dengan Tim Teknis Timus dan Timsin serta Sekretariat Jenderal DPR RI tanggal 17 Juli 2025.	Sosialisasi Pengunduhan Dokumen Pengusulan dan Pembahasan RUU KUHAP pada Website dpr.go.id.	
7.		Rapat Timus dan Timsin Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tanggal 17 Juli 2025.	Membahas Penjelasan oleh Tim Teknis Timus dan Timsin RUU KUHAP.	
8.		RDPU Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indoensia (YLBHI) tanggal 21 Juli 2025.	Menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	
9.		RDPU Komisi III DPR RI dengan Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum dan Asosiasi Organisasi Advokat tanggal 21 Juli 2025.	Menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	
10.		RDPU Komisi III DPR RI tanggal 22 Juli 2025 dengan: 1. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (BEM FH UNNES) 3. Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)	Menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 3. Kepala Badan Narkotika Nasional	Rapat Kerja Komisi III DPR RI tanggal 10 Juli 2025 membahas: 1. RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026. 2. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.	Rapat Kerja ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024. 2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp878.039.701.000,- (<i>Delapan ratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp1.347.969.819.000,- (<i>Satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp2.226.009.520.000,- (<i>Dua triliun dua ratus dua puluh enam miliar sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah</i>). 3. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp199.025.363.000,- (<i>Seratus sembilan puluh sembilan miliar dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp991.945.136.000,- (<i>Sembilan ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp1.190.970.499.000, (<i>Satu triliun seratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah</i>).	--

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.015.832.652.000,- (Satu triliun lima belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh dua rupiah) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp1.140.833.494.000,- (Satu triliun seratus empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.156.666.146.000,- (Dua triliun seratus lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).</p> <p>5. Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan pagu indikatif anggaran tahun 2026 kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang	Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 27 Juli 2025 dalam rangka fungsi pengawasan.	<p>Kunjungan kerja ini menghasilkan masukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta Polri, khususnya Gubernur Akpol Lemdiklat untuk terus memastikan integritas dan transparansi internal Kepolisian yang melaksanakan pendidikan Akpol agar isu-isu pungutan biaya untuk dapat mengikuti pendidikan Taruna Akpol bisa ternetralisir. 2. Menyarankan agar program serta kurikulum yang diberikan selama masa pendidikan berfokus kepada isu-isu nasionalisme, sehingga kedepannya para taruna-taruna 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dapat lebih mengedepankan kepentingan nasional dan masyarakat daripada mengedepankan kepentingan diri sendiri.</p> <p>3. Mengapresiasi <i>Institutional Will</i> Kepolisian Republik Indonesia atas peningkatan kuota yang terus dilakukan Polri dalam menerima calon taruna wanita, serta meminta Gubernur Akpol Lemdiklat untuk terus meningkatkan penerimaan calon taruna wanita, bahkan kalo bisa sampai 50% calon taruna wanita dan 50% calon taruna pria.</p> <p>4. Meminta Gubernur Akpol Lemdiklat untuk mengkaji penerimaan taruna Akpol berdasarkan <i>background</i> dan prestasi yang lebih masif lagi, seperti prestasi dalam bidang teknologi, olahraga, sampai prestasi dibidang agama, sosial, dan lain-lain, karena Institusi Kepolisian harus bisa menjadi wadah untuk pengembangan potensi anak bangsa.</p> <p>5. Meminta kepada Gubernur Akpol Lemdiklat untuk terus meningkatkan kurikulum dan ilmu-ilmu yang disampaikan dalam proses pendidikan taruna Akpol, khususnya kurikulum terkait kepemimpinan.</p> <p>6. Menyarankan kepada Gubernur Akpol Lemdiklat untuk mengkaji penjaringan berupa <i>invitation</i> mengikuti Pendidikan Akpol kepada anak bangsa yang dianggap memiliki potensi, sehingga kedepannya Kepolisian memiliki tim <i>scouting</i> yang dapat melihat potensi anak bangsa dan tidak hanya melakukan pembukaan (<i>open recruitment</i>) saja.</p>	
2.	<ol style="list-style-type: none"> Keluarga Konay Fransisco Bernando Bessi & Partners (Kuasa Hukum) 	RDPU Komisi III DPR RI tanggal 16 Juli 2025.	Menerima Pengaduan Masyarakat terkait Permasalahan Hukum Dualisme Kepemilikan Tanah.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja dengan Lembaga Swadaya Masyarakat 1. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) 2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) + perwakilan masyarakat adat; 3. WWF Indonesia; 4. Auriga Nusantara; 5. Working Group ICCAs Indonesia (WGII); 6. HuMa; 7. Greenpeace Indonesia; dan 8. Forum Dialog Konservasi Indonesia.	Menerima aspirasi, masukan dan pandangan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap Konsep RUU Kehutanan.	-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Pertanian	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026 (hasil pembahasan akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi); dan 2. Isu-isu aktual lainnya.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Menteri Kehutanan	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, pukul 13.30 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026 (hasil pembahasan akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi); dan 2. Isu-isu aktual lainnya. 	
3.	Menteri Pertanian	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 (hasil pembahasan akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran); dan 2. Isu-isu aktual lainnya. 	
4.	Menteri Kehutanan	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 (hasil pembahasan akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran); dan 2. Isu-isu aktual lainnya. 	
5.	Menteri Kelautan dan Perikanan	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juli 2025, pukul 10.00 WIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 (hasil pembahasan akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran); dan 2. Isu-isu aktual lainnya. 	
6.	Badan Pangan Nasional	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 (hasil pembahasan akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran); dan 2. Isu-isu aktual lainnya. 	
7.	Badan Karantina Indonesia	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juli 2025, pukul 15.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 (hasil pembahasan akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran); dan 2. Isu-isu aktual lainnya 	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR)	Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.	Pembahasan terkait Dampak Penetapan Satgas PKH terhadap Lahan PIR TRANS.	
2.	1. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian KP; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian KP; 3. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP; 4. Deputi Bidang Karantina Ikan, Barantin; 5. Direksi ID FOOD/RNI; dan 6. Pelaku Usaha/Eksportir Ikan dan Masyarakat	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada 18 – 20 Juli 2025.	Meninjau infrastruktur dan diskusi di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSL) Makassar, Sulawesi Selatan.	
3.	1. Gubernur Bali; 2. Bupati Tabanan; 3. Kepala Badan Karantina Indonesia; 4. Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian; 5. Kepala BPPSDMP, Kementerian Pertanian; 6. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian; 7. Ditjen PSP, Kementerian Pertanian; 8. Dirut PT Pupuk Indonesia;	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Bali dilaksanakan pada 18 – 20 Juli 2025.	Meninjau dan Berdialog dengan Petani Kakao Mengenai Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah Komoditas Kakao Yang Berdaya Saing Tinggi dan Berorientasi Ekspor di Cau Chocolates Factory & Restaurant.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	9. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Bali; 10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali; dan 11. Penyuluh Pertanian, Gapoktan, dan Petani Milenial Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.			
4.	1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan; 2. Walikota Palembang; 3. Direktur Jenderal KSDAE, kemenhut; 4. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Kemenhut; 5. Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanski Administratif, dan Keperdataan Kehutanan, Ditjen GAKKUM, Kemenhut; 6. Kepala BKSDA Sumatera Selatan, Kemenhut; 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; dan 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada 18 – 20 Juli 2025.	Meninjau Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang Sumatera Selatan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	3. Sestama BMKG 4. Sestama Basarnas	RDP dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025.	Pendalaman Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026.	
2.	Kementerian Perhubungan : 1. Sekjen 2. Irjen 3. Kepala Badan Kebijakan Transportasi 4. Kepala Badan Pengembangan SDM P	RDP dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025.	Pendalaman Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026.	
3.	Kementerian Perhubungan : 1. Dirjen Perhubungan Darat (menghadirkan Kabalai Pengelola Transportasi Darat seluruh Indonesia) 2. Dirjen Perhubungan Laut (menghadirkan Kepala unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I dan Kelas II) 3. Dirjen Perhubungan Udara (menghadirkan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I dan Kelas Khusus)	RDP dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025.	Pendalaman Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	4. Dirjen Perkeretaapian (menghadirkan Kabalai Teknik Perkeretaapian seluruh Indonesia) 5. Dirjen Integrasi, Transportasi dan Multimoda.			
4.	Kementerian Transmigrasi : 1. Sekjen 2. Irjen 3. Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 4. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	RDP dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025.	Pendalaman Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026.	
5.	Kementerian Pekerjaan Umum : 1. Sekjen 2. Irjen 3. Kepala BPSDM 4. Kepala BPIW	RDP dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025.	Pendalaman Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026.	
6.	Kementerian Pekerjaan Umum : 1. Dirjen Bina Marga (menghadirkan Kabalai Pelaksanaan Jalan Nasional Seluruh Indonesia) 2. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur 3. Dirjen Bina Konstruksi (menghadirkan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Seluruh Indonesia (BP2JK)	RDP dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025.	Pendalaman Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Kementerian Umum : 1. Dirjen Cipta Karya (Menghadirkan Kabalai Prasarana Permukiman Wilayah Seluruh Indonesia) 2. Dirjen SDA (menghadirkan Kabalai Wilayah Sungai Seluruh Indonesia) 3. Dirjen Prasarana Strategis	RDP dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025.	Pendalaman Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026.	
8.	Kementerian Desa dan PDT: 1. Sekjen 2. Irjen 3. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan 4. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal 5. Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 6. Kepala BPSDM 7. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	RDP dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025.	Pendalaman Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026.	
9.	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman : 1. Sekjen 2. Irjen 3. Dirjen Perumahan Perdesaan 4. Dirjen Perumahan Perkotaan 5. Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 6. Dirjen Kawasan Permukiman	RDP dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025.	Pendalaman Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	DPRD Kota Surabaya	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025.	Studi terkait permasalahan Apartemen Grup Puncak yang tidak dibangun dan tidak Keluar Sertifikat.	
2.	Kementerian Perhubungan : - Dirjen Perhubungan Darat - Dirjen Perhubungan Udara	Kunker Spesifik dilaksanakan pada tanggal 11-13 Juli 2025.	1. Meninjau Jembatan Timbang UPPKB Kemang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. 2. Meninjau Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Provinsi Banten.	
3.	Kementerian Perhubungan - Dirjen Perhubungan Laut - Basarnas	Kunker Spesifik dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juli 2025.	Meninjau Posko Basarnas di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.	
4	DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara	Audiensi dilaksanakan pada 24 Juli 2025.	Koordinasi dan Konsultasi terkait Sarana dan Prasarana Infrastruktur.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perlindungan Konsumen	RDPU Panja Perlindungan Konsumen dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Juli 2025 pukul 10.00 WIB, dengan: <ol style="list-style-type: none">1. Gabungan Industri Kendaraan bermotor Indonesia (GAIKINDO)2. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi)3. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)4. Gabungan Pengusaha Elektronik (GABEL)	Meminta masukan terkait UU tentang Perlindungan Konsumen.	
2.		RDPU Panja Perlindungan Konsumen dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Juli 2025 pukul 10.00 WIB dengan: <ol style="list-style-type: none">1. Kamar Dagang dan industri (KADIN)2. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)3. Majelis Disiplin Profesi (MDP) <p>Serta dengan para pakar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. Edmon Makarim (FH, UI) tidak datang2. Dr. Anna Maria Tri Anggraini (FH, Trisakti) tidak datang3. Dr. Akhmad Budi Cahyono (FH, UI)	Meminta masukan terkait draft Naskah Akademik dan draft RUU tentang perubahan atas UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Menteri Perdagangan. 2. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).	Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan, serta menghadirkan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dilaksanakan pada hari Senin, 14 Juli 2025 pukul 10.00 WIB.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan TA 2024; dan 2. Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Perdagangan TA 2026.	
2.	Menyeri Perdagangan	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Juli 2025 pukul 16.00 WIB dengan Menteri Perdagangan.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan TA 2024; dan 2. Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Perdagangan TA 2026.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Perum Perumnas 2. Bank BTN 3. PT Semen Indonesia(Persero)	Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada Jumat – Minggu, 11-13 Juli 2025, pukul 09.30 WIB, ke: 1. Bandung, Jawa Barat 2. Surabaya, Jawa Timur 3. Magelang, Jawa Tengah	1. Pembahasan Proyek Pengembangan 3 Juta Unit Perumahan Rakyat beserta Dukungan Pembiayaan Perbankan dan Bahan Baku Pendukung. 2. Pengelolaan jalan TOL. 3. Peninjauan Pengembangan Destinasi Pariwisata Candi Borobudur.	
2.	1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan 2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	RDP Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Juli 2025.	1. Perkenalan Dirut dan jajaran Direksi; 2. Evaluasi kinerja Perusahaan Triwulan 1 Tahun 2025; 3. Aksi Korporasi dan <i>roadmap</i> pengembangan perusahaan;	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	3. Bank Syariah Indonesia		4. Lain-lain.	
3.	1. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam); dan 2. Dewan Kawasan Batam. 3. PLN Batam 4. Semen Indonesia Grup.	Kunjungan Kerja Panja Tata Kelola Kawasan Batam Komisi VI DPR RI ke Kepulauan Riau (Kota Batam) dilaksanakan pada hari Kamis – Sabtu, 17 – 19 Juli 2025.	Masalah tata kelola lahan, ketidaksesuaian pengelolaan kawasan industri, dan kebijakan investasi yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Batam.	
4.	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pelabuhan Merak Kota Cilegon dilaksanakan pada hari Kamis – Sabtu, 17 – 19 Juli 2025.	Peninjauan Pengembangan Pelabuhan terpadu Merak.	
5.	1. Kementerian BUMN 2. BPI Danantara	Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN dan RDP Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPI Danantara dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Juli 2025.	1. Pemaparan struktur organisasi BPI Danantara, <i>Holding Operasional</i> , dan <i>Holding Investasi</i> ; 2. Pemaparan <i>roadmap</i> serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) <i>Holding Operasional</i> dan <i>Holding Investasi</i> ; dan 3. Lain-lain.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Dirut LKPP TVRI; 2. Dirut LKPP RRI; 3. Dirut LKBN Antara.	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat APBN 2024; 2. Pembahasan RKAL 2026 dan RKP K/L 2026.	
2.	Menteri UMKM RI	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat APBN 2024; 2. Pembahasan RKAL 2026 dan RKP K/L 2026.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Perindustrian RI	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Minggu, 11 s.d. 13 Juli 2025 ke: 1. KEK Batang-Jawa Tengah 2. KEK Subang-Jawa Barat 3. KEK Sei Mangke-Sumatera Utara	Memperoleh informasi yang komprehensif mengenai tantangan, kendala dan hambatan yang dihadapi pelaku industri non migas yang berada di wilayah kerja layanan Kawasan Industri Batang (Jawa Tengah), Subang (Jawa Barat), Medan (Sumatera Utara) yang dikaitkan dengan peningkatan produksi, produktivitas, efisiensi produksi dan sumber daya industri, standardisasi, dan pemanfaatan teknologi baik teknologi industri maupun teknologi informasi dan komunikasi.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	1. Kementerian Pariwisata RI; 2. Kementerian Perindustrian RI; 3. Kementerian Ekonomi Kreatif RI	<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu, 14 s.d. 16 Juli 2025 ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunspek ke desa wisata Wukirsari di Yogyakarta 2. Kunspek ke PT Bangun Solusi Indonesia dan PT SIG (Persero), Tbk dan anak perusahaan SIG di gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat 3. Kunspek ke KEK (kawasan ekonomi khusus) berbasis digital Singhasari, Malang Jawa Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui kondisi faktual dan tantangan yang dihadapi Desa Wisata Wukirsari dalam pengelolaan dan pengembangan wisata berbasis komunitas dan memperoleh informasi yang komprehensif mengenai tantangan, kendala dan hambatan yang dihadapi. 2. Memperoleh informasi dan pemahaman langsung mengenai proses produksi semen di PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) Tbk dan berdialog dengan PT Semen Group Tbk (<i>Holding</i>) terkait implementasi kebijakan industri hijau dan transisi energi, serta Mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam pengembangan industri semen nasional menuju industri berkelanjutan. 3. Peninjauan terhadap perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari yang menjadi salah satu kawasan strategis nasional di bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif dan memperoleh informasi yang komprehensif mengenai tantangan, kendala dan hambatan yang dihadapi. 	
3.	Plt. Kepala BSN menghadirkan: 1. PT Superintending Company Indonesia (SUCOFINDO); 2. PT Surveyor Indonesia; 3. PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Kamis 17 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Penilai Kesesuaian	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Plt. Kepala BSN menghadirkan: 1. PT Anindya Certification and Testing (ACT); 2. PT Mutuagung Lestari, Tbk; 3. PT CARSURIN, Tbk.	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Kamis 17 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.	Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Penilai Kesesuaian.	
5.	Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian RI	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Kamis 17 Juli 2025, pukul 17.00 WIB.	Kesiapan dalam rangka Indonesia menjadi Partner Country pada penyelenggaraan Pameran Industri Internasional 'INNOPROM' di Rusia.	
6.	Kementerian Perindustrian RI	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu, 21 s.d. 23 Juli 2025 ke: 1. Provinsi Jawa Barat ke Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung 2. Provinsi Sumatera Utara ke Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan 3. Provinsi Banten ke Politeknik Teknologi Petrokimia Kab.Serang	1. Memperoleh informasi mengenai sistem pendidikan vokasi industri tekstil, teknologi kimia, teknologi petrokimia di Politeknik STTT Bandung, Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, Politeknik Teknologi Petrokimia Kabupaten Serang. 2. Mendapatkan masukan dari sekolah terkait dalam mencetak SDM industri tekstil yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi industri. 3. Menggali masukan untuk penguatan regulasi dan kebijakan bagi pengembangan pendidikan vokasi di bidang industri, penguatan SDM industri, dan penyelarasan kebutuhan industri nasional.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, BNPB, dan Badan Penyelenggaraan Haji	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Kepala BNPB, dan Kepala BP Haji dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2025.2. Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga per Juni 2025.3. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga serta Rencana Kerja dan Program Kementerian/ Lembaga Tahun 2026.	
2.	Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH)	Raker Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) dilaksanakan pada hari Senin, 14 Juli 2025.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024.2. Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025.3. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga serta Rencana Kerja dan Program Kementerian/Lembaga Tahun 2026	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Asrama haji Embarkasi Provinsi Banten	Asrama haji Grand El Hajj Banten dilaksanakan pada tanggal 16-18 Juli 2025.	<p>Pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 ke Asrama Haji Grand El Hajj, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, dengan Kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut;</p> <p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelesaikan Pembangunan Asrama Haji Grand El Hajj Banten sesuai dengan target, yakni sampai Bulan Desember 2025.2. Mempersiapkan sarana dan prasarana Asrama Haji Grand El Hajj Banten untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M baik untuk embarkasi maupun debarkasi jemaah.3. Memanfaatkan penggunaan Asrama Haji Grand El Hajj Banten untuk kepentingan umum, tidak hanya Kementerian Agama, namun Kementerian/Lembaga lain juga dapat menggunakannya. <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memprioritaskan program pengembangan sarana dan prasarana Asrama Haji Grand El Hajj Banten, berdasarkan kebutuhan calon jemaah haji seperti pembelajaran manasik haji/umrah.2. Menyegerakan terbitnya peraturan dan petunjuk teknis yang detail dan terperinci tentang pengelolaan asrama haji Grand El Hajj Banten untuk embarkasi dan debarkasi. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga lain, terkait pelayanan dan evakuasi keselamatan jemaah haji sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan dari tanah suci.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Rapat Panja RUU dengan Kepala Badan keahlian Dewan (BKD) Setjen DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Juli 2025.	Perkembangan Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Rapat Tertutup.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Juli 2025, pukul 10.00 WIB dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.	Rapat tertutup	
2	Menteri Kesehatan RI	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Juli 2025, pukul 13.00 WIB dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.	Rapat tertutup	
3	Kepala Badan POM	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Senin, 21 Juli 2025, pukul 13.00 WIB dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.	Rapat tertutup	
4	Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Senin, 21 Juli 2025 pukul 16.00 WIB dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.	Rapat tertutup	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, pukul 10.00 WIB, dengan agenda: 1. Laporan Realisasi (Semester I) Anggaran Tahun 2025 dan <i>Outlook</i> Tahun 2025 2. Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026	Rapat Tertutup	
2.	Kepala Badan Gizi Nasional	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, pukul 13.00 WIB, dengan agenda: 1. Laporan Realisasi (Semester I) Anggaran Tahun 2025 dan <i>Outlook</i> Tahun 2025 2. Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026	Rapat Tertutup.	
3.	1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) 3. Indonesian Stop TB Partnership (ISTB) 4. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)	Rapat Panja Percepatan Eliminasi Tuberculosis dilaksanakan pada hari Senin, 14 Juli 2025, pukul 13.30 WIB dengan agenda: 1. Pemetaan kontribusi dan tantangan organisasi profesi, fasilitas layanan	Panja Percepatan Eliminasi Tuberculosis Komisi IX DPR RI menerima masukan-masukan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) dan Stop TB Partnership Indonesia serta akan menjadi bahan dalam menyusun rekomendasi Panja.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	5. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)	<p>kesehatan, dan masyarakat sipil dalam eliminasi TB.</p> <p>2. Penguatan sinergi program antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk percepatan eliminasi TB.</p> <p>3. Penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis praktik baik untuk mendukung target eliminasi TB 2030.</p>		
4.	<p>Rapat Kerja Komisi IX DPR RI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Kesehatan RI 2. Menteri Sosial RI 3. Menteri Dalam Negeri <p>Rapat Dengar Pendapat dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pusat Statistik 2. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional 3. Dirut BPJS Kesehatan <p>Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES)</p>	<p>Rapat Kerja, RDP dan RDPU dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Juli 2025, pukul 13.00 WIB dengan agenda Pembahasan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) beserta solusi atas permasalahan data PBI.</p>	<p>1. Komisi IX DPR RI dan Kementerian Kesehatan RI menyepakati untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak penonaktifan kepesertaan PBI, serta memperkuat sistem transisi dan mekanisme reaktivasi, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjamin prinsip <i>continuity of care (pelayanan kesehatan yang berkelanjutan)</i> bagi kelompok yang tengah menjalani pengobatan penyakit kronis, katastropik, termasuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, agar tidak mengalami gangguan akses layanan akibat perubahan status kepesertaan; dan b. Menjadikan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagai pusat layanan informasi, fasilitasi, dan pengaduan peserta nonaktif, serta berperan aktif dalam proses reaktivasi dan pelacakan kasus di lapangan. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2. Komisi IX DPR RI meminta agar DJSN segera melakukan reformasi kebijakan penetapan PBI JKN dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengevaluasi dampak kebijakan pemanfaatan DTSEN terhadap keberlanjutan sistem JKN dan capaian <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> dalam kerangka evaluasi implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);b. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi strategis kepada Presiden RI, khususnya terkait kebutuhan revisi regulasi teknis agar lebih adaptif dan inklusif; danc. Mengkaji penerapan skema pengampunan tunggakan untuk meringankan beban peserta JKN mandiri. <p>3. Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan bersepakat untuk memastikan perlindungan terhadap peserta PBI nonaktif setelah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri RI melalui mekanisme reaktivasi yang cepat dan sistem informasi yang proaktif dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menjamin proses reaktivasi peserta PBI nonaktif berjalan cepat, mudah diakses, dan tidak diskriminatif, baik melalui kanal digital, pelayanan tatap muka, maupun melalui FKTP;	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>b. Memastikan peserta yang sedang dalam kondisi medis gawat, kronis, atau menjalani rawat jalan tetap mendapatkan hak layanan kesehatan, meskipun sedang dalam proses reaktivasi atau pemutakhiran data; dan</p> <p>c. Meningkatkan notifikasi status kepesertaan melalui kanal SMS, aplikasi <i>mobile</i>, dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan.</p> <p>4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, dan DJSN agar berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI dan Badan Pusat Statistik RI untuk membuka ruang koreksi dan mempercepat reaktivasi peserta PBI dengan pendekatan berbasis data lokal dan keadilan sosial, melalui:</p> <p>a. Penyesuaian kuota reaktivasi PBI sesuai kebutuhan aktual masing-masing daerah;</p> <p>b. Membuka ruang koreksi dan sanggahan dari pemerintah daerah terhadap data peserta PBI, serta memperkuat mekanisme pemutakhiran berbasis data desa dan kelurahan;</p> <p>c. Memperkuat integrasi dan koordinasi antarprogram jaminan sosial agar tidak terjadi subsidi ganda atau tumpang tindih antara PBI, PBPU Pemda, PKH, dan skema bantuan lain seperti KIS dan bantuan lainnya;</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>d. Menyiapkan kanal pengaduan publik yang responsif dan inklusif untuk warga miskin yang terdampak penonaktifan tanpa pemberitahuan jelas; dan</p> <p>e. Menetapkan indikator kinerja reaktivasi PBI yang transparan dan dapat dimonitor publik.</p> <p>5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, dan DJSN agar berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Badan Pusat Statistik RI untuk memperkuat sistem kependudukan dan mendukung validasi data PBI di daerah, melalui:</p> <p>a. Menginstruksikan kepada kepala daerah untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengecekan secara langsung data kependudukan dan data sosial ekonomi sebagai dasar penetapan PBI;</p> <p>b. Memastikan layanan dukcapil menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah 3T dan DOB, dengan pendekatan jemput bola dan integrasi sistem digital;</p> <p>c. Mempercepat perekaman KTP elektronik dan penertiban NIK bermasalah, termasuk penghapusan data ganda dan pembaruan data penduduk rentan (ODGJ, tuna wisma, eks narapidana); dan</p> <p>d. Melakukan pemanfaatan antara data nonaktif peserta PBI dengan DTSEN dan data kependudukan untuk</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>meminimalisir penonaktifan peserta PBI secara sepihak.</p> <p>6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, dan DJSN agar berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik RI dan Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri RI untuk meningkatkan kualitas dan keterbukaan DTSEN serta memastikan akurasi desil sebagai landasan kebijakan sosial, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan kualitas metodologi penetapan desil kesejahteraan dalam DTSEN agar tidak menimbulkan <i>exclusion error</i> dan <i>inclusion error</i> yang tinggi;b. Meningkatkan transparansi proses pemeringkatan desil dan memberikan data balikan DTSEN kepada pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan intervensi sosial;c. Menyediakan informasi dan peningkatan kapasitas (<i>capacity building</i>) kepada pemerintah daerah agar tidak terjadi misinterpretasi atas DTSEN; dand. Menyesuaikan DTSEN terhadap kondisi darurat seperti migrasi, PHK massal, atau bencana. <p>7. Komisi IX DPR RI mendorong ADINKES memperkuat koordinasi daerah dan menjadi jembatan advokasi</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>antara pemerintah pusat dan dinas kesehatan terhadap dampak kebijakan penonaktifan PBI dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan pelaporan dampak kebijakan penonaktifan PBI terhadap keberlangsungan layanan dasar, termasuk penurunan kapitasi, beban kerja tenaga kesehatan, serta kendala pelayanan di FKTP; Menjadi penghubung antara pusat dan daerah dalam merespons kebijakan berbasis DTSEN, termasuk menyampaikan masukan lapangan secara terstruktur kepada pemerintah; dan Menyampaikan praktik-praktik baik (<i>best practices</i>) dari daerah yang berhasil menangani transisi peserta PBI Nonaktif secara efisien dan manusiawi 	
5.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI	Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ketenagakerjaan dilaksanakan pada hari Kamis-Sabtu, 17-19 Juli 2025.	<p>Pengawasan terhadap pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah 2. Kota Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta 3. Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Badan Keahlian DPR RI	RDP Komisi X DPR RI dengan Plt. Kepala Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Juli 2025, Pukul 11.00 WIB dengan Agenda: Presentasi Kepala Badan Keahlian DPR RI mengenai NA dan Draf Awal RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional.	1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Badan Keahlian DPR RI yang telah menyampaikan bahan dan paparan Naskah Akademik dan Draft Awal RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Komisi X DPR RI akan mengundang kembali Badan Keahlian DPR RI untuk mempresentasikan penyempurnaan Naskah Akademik dan Draft Awal RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional, berdasarkan masukan-masukan Anggota Komisi X DPR RI pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2025—2026.	(Rapat Tertutup)

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, Pukul 10.00 WIB. Agenda: Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	(Rapat Tertutup) 1. Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kemendikdasmen RI pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp33.651.752.088.000 (<i>Tiga puluh tiga triliun enam ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah</i>). 2. Terkait anggaran untuk memenuhi amanat Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024 tentang pendidikan tanpa pungutan biaya pada jenjang pendidikan dasar 9 tahun, Kemendikdasmen RI wajib	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			melakukan pemenuhannya secara bertahap dan harus dialokasikan pada Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2026.	
2.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, Pukul 11.00 WIB. Agenda: Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	(Rapat Tertutup) Komisi X DPR RI menyetujui pagu Indikatif Kemdiktisaintek RI pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp55.452.489.382.000 (<i>Lima puluh lima triliun empat ratus lima puluh dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah</i>), dan akan menyampaikan usulan pagu Indikatif dan usulan tambahan anggaran Kemdiktisaintek RI pada RAPBN TA 2026 ke Badan Anggaran DPR RI.	
3.	Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, Pukul 13.00 WIB. Agenda: Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	(Rapat Tertutup) Komisi X DPR RI menyetujui pagu Indikatif Kementerian Kebudayaan pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp827.391.821.000 (<i>Delapan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah</i>), dan akan menyampaikan usulan pagu Indikatif dan usulan tambahan anggaran Kemenbud RI pada RAPBN TA 2026 ke Badan Anggaran DPR RI.	
4.	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, Pukul 14.00 WIB. Agenda: Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026	(Rapat Tertutup) Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kemenpora RI TA 2026 sebesar Rp248.716.530.000 (<i>Dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah</i>), dan akan menyampaikan Pagu Anggaran Kemenpora RI pada RAPBN TA 2026 ke Badan Anggaran DPR RI.	
5.	Kepala Perpusnas RI	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpusnas dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, pukul 15.00 WIB. Agenda: Pembahasan RKA-K/L TA	(Rapat Tertutup) Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Perpusnas RI TA 2026 sebesar Rp266.699.537.000 (<i>Dua ratus enam puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah</i>), dan usulan Dana Alokasi Khusus sebesar	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	Rp700.000.000.000 (<i>Tujuh ratus miliar rupiah</i>). Pagu Indikatif Perpusnas RI pada RAPBN TA 2026 dan Usulan tambahan akan disampaikan Komisi X DPR RI ke Badan Anggaran DPR RI.	
6.	Kepala BRIN	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kepala BRIN dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, pukul 16.00 WIB. Agenda: Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026	(Rapat Tertutup) Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Indikatif BRIN pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp4.271.743.006.000 (<i>Empat triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ribu rupiah</i>), dan akan menyampaikan usulan Pagu Indikatif BRIN pada RAPBN TA 2026 dan usulan tambahan kepada Badan Anggaran DPR RI.	
7.	Kepala BPS	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kepala BPS dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, pukul 18.30 WIB. Agenda: Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	(Rapat Tertutup) Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Indikatif BPS TA 2026 sebesar Rp3.692.123.265.000 (<i>Tiga triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah</i>), dan akan menyampaikan Pagu Indikatif BPS pada RAPBN TA 2026 dan usulan tambahan ke Badan Anggaran DPR RI.	
8.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikdasmen RI dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Juli 2025, pukul 10.00 WIB. Agenda: Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.	(Rapat Tertutup) 1. Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikdasmen RI TA 2024 sebesar 96,9% dan mendorong Kemendikdasmen RI untuk mempertahankan opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) untuk tahun-tahun berikutnya. 2. Terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Kemendikdasmen RI, Komisi X DPR RI menyampaikan catatan kepada Kemendikdasmen RI untuk: a. Melakukan evaluasi dan pembuatan rencana kerja yang lebih matang terhadap capaian kinerja, meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta meningkatkan transparansi kinerja, termasuk menanggapi isu-isu publik.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan perhatian terhadap daerah 3T dan daerah marginal melalui program afirmasi, serta Mengevaluasi Program peningkatan kompetensi dan distribusi guru. c. Meningkatkan kolaborasi strategis antara lembaga pendidikan, khususnya SMK, dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta Melakukan evaluasi terhadap mekanisme dan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). 	
9.	Kementerian Pendidikan Tingi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendiktisaintek RI dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Juli 2025, pukul 14.00 WIB. Agenda: Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.	<p>(Rapat Tertutup)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemdiktisaintek RI (sebelumnya Kemendikbudristek RI) atas realisasi anggaran sebesar 94,59 % pada APBN TA 2024 dan capaian Opini BPK Tahun 2024 dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan mendorong agar mempertahankan pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. 2. Komisi X DPR RI mendorong Kemdiktisaintek RI untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi secara komprehensif dan menindaklanjuti temuan BPK berdasarkan LHP BPK Tahun 2024, serta Segera melakukan koordinasi secara intensif dengan Kemendikdasmen RI untuk mempercepat likuidasi Kemendikbudristek RI. b. Memperkuat sistem pengendalian intern (SPI) Kemdiktisaintek RI. c. Menata penyelenggaraan perguruan tinggi, khususnya permasalahan pendidikan kedokteran, dan dukungan terhadap pengembangan perguruan tinggi swasta, serta memperkuat riset perguruan tinggi dan integrasinya dengan pemangku kepentingan lainnya. d. Melakukan pendampingan terhadap tiga PTN BLU yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2024, serta Melakukan penelaahan agar dosen PTS yang lulus PPPK dapat ditugaskan kembali di PTS asal. 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> e. Membuat kebijakan afirmasi pendidikan untuk daerah 3T dalam rangka pencapaian APK PT di seluruh Indonesia. 	
10.	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	<p>Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Juli 2025, pukul 16.00 WIB.</p> <p>Agenda: Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024</p>	<p>(Rapat Tertutup)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemenpora RI TA 2024 sebesar 98,43% dan mendorong Kemenpora RI untuk mempertahankan opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) untuk tahun-tahun berikutnya. 2. Terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Kemenpora RI, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Memaksimalkan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan mempercepat penyelesaian temuan, meningkatkan koordinasi internal, dan mengoptimalkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). b. Mendorong peningkatan kualitas SDM kepemudaan. c. Menyusun secara lebih berimbang dan terukur terkait Kebijakan anggaran di bidang kepemudaan dengan memastikan keselarasan antara alokasi anggaran, tujuan program, dan capaian dengan program kepemudaan lintas K/L. 	
11.	Perpustakaan Nasional	<p>Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Perpusnas RI dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.</p> <p>Agenda: Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.</p>	<p>(Rapat Tertutup)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Perpusnas RI TA 2024 sebesar 98,98% dan mendorong Perpusnas RI untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun berikutnya. 2. Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan kepada Perpusnas RI yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Segera menyelesaikan rekomendasi BPK RI pada APBN TA 2024 yang masih tersisa (18,4%), dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) dan 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>meningkatkan koordinasi internal, dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI).</p> <p>b. Perencanaan dan kinerja anggaran Perpusnas RI, perlu tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga pada hasil (<i>output</i>) dan dampak (<i>outcome</i>) yang terukur pada peningkatan minat baca, pemerataan akses pengetahuan, serta pemberdayaan masyarakat melalui literasi.</p> <p>c. Perencanaan dan mekanisme distribusi bantuan serta program Perpusnas RI, didorong untuk lebih menjangkau lapisan masyarakat, terutama afirmasi di daerah 3T dan marginal.</p>	
12.	Badan Pusat Statistik	<p>Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan BPS dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Juli 2025, pukul 12.30 WIB.</p> <p>Agenda: Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.</p>	<p>(Rapat Tertutup)</p> <p>1. Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran BPS TA 2024 sebesar 98,13% dan mendorong BPS untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun berikutnya.</p> <p>2. Terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Kepala BPS, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan yaitu:</p> <p>a. Menyelesaikan rekomendasi BPK RI yang secara kumulatif sampai tahun 2024 masih tersisa 19,14%, dengan meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan koordinasi internal dan eksternal.</p> <p>b. Meningkatkan perencanaan pengelolaan aset barang milik negara secara lebih efektif, termasuk melakukan identifikasi, pemantauan, dan evaluasi risiko potensial yang mungkin timbul dalam berbagai bentuk kerja sama dengan pihak eksternal.</p> <p>c. Mengantisipasi dan memastikan kelancaran kerja petugas hingga tahap pendataan berakhir, termasuk menjamin anggaran dan kondisi operasional yang optimal.</p>	
13.	Badan Ristek dan Inovasi Nasional	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan BRIN dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Juli 2024, pukul 14.00	<p>(Rapat Tertutup)</p> <p>1. Komisi X DPR RI menerima dan memahami laporan realisasi anggaran BRIN RI TA 2024 sebesar 84,49% dan mendorong BRIN</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>WIB.</p> <p>Agenda: Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.</p>	<p>untuk mempertahankan opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) pada tahun-tahun selanjutnya.</p> <p>2. Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelesaikan rekomendasi BPK RI pada APBN TA 2024 yang masih tersisa, dengan mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan koordinasi internal dan eksternal. Melakukan evaluasi terhadap realisasi belanja dan mengambil langkah strategis, serta Memperkuat koordinasi dan integrasi riset dengan pemangku kepentingan lainnya khususnya dengan Kemdiktisaintek RI. 	
14.	Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia	<p>Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan RI dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Juli 2025, pukul 15.00 WIB.</p> <p>Agenda: Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.</p>	<p>(Rapat Tertutup)</p> <p>1. Komisi X DPR RI menerima dan mengapresiasi Kemenbud RI (sebelumnya Kemendikbudristek RI) atas realisasi anggaran sebesar 94,59 % pada APBN TA 2024 dan capaian opini BPK RI Tahun 2024 dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta mendorong agar mempertahankan capaian prestasi ini pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya.</p> <p>2. Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Realisasi anggaran pada tahun 2025 dengan fokus kepada peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Kemendikdasmen RI untuk mempercepat likuidasi Kemendikbudristek RI. Melakukan evaluasi secara komprehensif dan merealisasikan rencana aksi atas 9 temuan pemeriksaan BPK RI pada APBN TA 2024 yang masih tersisa, serta Memperkuat sistem pengendalian internal (SPI) Kemenbud RI agar temuan BPK RI tahun 2024 tidak berulang. Melakukan penataan secara teliti dan menyeluruh mengenai pengelolaan aset dan pendapatan melalui PNBP. 	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Ikatan Pendidik Nusantara 2. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia	RDPU Komisi X DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 14 Juli 2025, pukul 10.00 WIB. Agenda: Penyampaian aspirasi tentang: 1. Wacana Peralihan ASN PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan ke PNS. 2. Perlindungan hukum kepada honorer khususnya Guru dan Tenaga Kependidikan.	<p>Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan regulasi yang secara khusus mengakomodasi dan menyelesaikan proses pengangkatan Guru dengan Kode R4 menjadi Guru ASN.2. Mendorong pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang menjamin perlindungan hukum dan kepastian kerja bagi guru dan tenaga kependidikan non ASN dan ASN PPPK, termasuk pengaturan mengenai status kepegawaian, hak atas jaminan sosial dan kesejahteraan, serta perlindungan dari pemutusan kontrak kerja yang tidak jelas.3. Mendorong penguatan skema ASN PPPK agar setara dengan PNS, terutama dalam hal hak pensiun, jenjang karier, dan perlindungan profesi, serta mendorong pemerintah mempercepat transformasi tata kelola guru secara menyeluruh mulai dari proses rekrutmen, pembinaan berkelanjutan, hingga kepastian hukum dalam satu kerangka regulasi setingkat undang-undang.4. Perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi profesi guru guna memastikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab profesinya sehingga kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan.5. Pemerintah perlu segera melakukan analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan secara	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			berjenjang, per mata pelajaran, dan berdasarkan kebutuhan di setiap wilayah guna memperoleh informasi yang akurat terkait kekurangan dan distribusi guru serta tenaga kependidikan.	
2.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Republik Indonesia	<p>RDP Panja Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI</p> <p>Kemendikdasmen Selasa, 15 Juli 2025, pukul 14.00 WIB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru. • Perwakilan Kepala Sekolah SD/SMP di Kabupaten Sumba Barat Daya. <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan terhadap strategi dan kebijakan pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal. 2. Kerja sama pemerintah pusat dan daerah dengan swasta di bidang pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal. 	<p>Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan program afirmasi pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, dengan memperhatikan karakteristik geografis dan sosial-budaya wilayah kepulauan. 2. Penerapan sistem pendidikan tidak dapat disamaratakan dengan pendekatan kontinental, sehingga diperlukan intervensi khusus dalam hal aksesibilitas, kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, infrastruktur, digitalisasi pendidikan, fasilitas listrik yang stabil, sanitasi air bersih serta dukungan anggaran yang proporsional guna mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bermutu. 3. Kolaborasi nyata multipihak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta melalui program CSR, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam membangun pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal, untuk memperkuat layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. 	
3.	Komisi X DPR RI	Rapat Intern Panja Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI dilaksanakan	(Rapat Tertutup) <p>Panja Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI menyepakati Laporan Panja dengan beberapa catatan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		pada hari Selasa, 22 Juli 2025, pukul 14.00 WIB. Agenda: Menyusun laporan Panja Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Daerah Marginal.	dan perbaikan, serta akan menyampaikannya dalam Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 23 Juli 2025.	
4.	Komisi X DPR RI	Rapat Intern Komisi X DPR RI dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	(Rapat Tertutup)	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Keuangan	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 dengan agenda Pengantar mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan Tahun 2026.	<p>Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan mengenai Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan Tahun 2026.2. Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan melanjutkan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 per- unit kerja Eselon 1 Kementerian Keuangan	
2.	1. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; 3. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 4. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 dengan agenda Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 6 Unit Eselon 1 Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026.	<ol style="list-style-type: none">1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari 6 unit eselon 1 Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Anggaran, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara) mengenai Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.2. Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Anggaran, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Fiskal Kementerian Keuangan; 5. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan; dan 6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.			
3.	1. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; 2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan; 3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 4. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan; 5. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 dengan agenda Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 8 Unit Eselon 1 Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026.	1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari 8 unit eselon 1 Kementerian Keuangan (Sekjen Kementerian Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Perimbangan Keuangan, Irjen Kementerian Keuangan, Kepala Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan, Kepala Lembaga Nasional <i>Single Window</i> , dan Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) mengenai Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. 2. Sekjen Kementerian Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Perimbangan Keuangan, Irjen Kementerian Keuangan, Kepala Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan, Kepala Lembaga Nasional <i>Single Window</i> , dan Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>6. Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan Kementerian Keuangan;</p> <p>7. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan;</p> <p>8. Lembaga Nasional <i>Single Window</i> Kementerian Keuangan.</p>			
4.	Menteri Keuangan	<p>Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 dengan agenda Pengambilan Keputusan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan Tahun 2026.</p>	<p>Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan atas Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Indikatif Kementerian Keuangan Tahun 2026, yang dilaksanakan pada Senin, 14 Juli 2025. 2. Arah Kebijakan dalam program dan kegiatan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> A. Direktorat Jenderal Pajak DJP memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Optimalisasi reformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan <i>tax ratio</i>. 2) Peningkatan sistem <i>core tax</i> untuk mempermudah sistem administrasi sistem perpajakan. B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengoptimalkan penerimaan negara melalui upaya-upaya pengawasan, penegakan hukum, ekstensifikasi dan intensifikasi cukai. 2) Memperkuat kebijakan untuk UMKM berorientasi ekspor. <p>C. Direktorat Jenderal Anggaran</p> <p>DJA memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas belanja yang efektif dan efisien melalui penguatan sinkronisasi belanja K/L dan Tranfer ke Daerah (TKD); 2) Memperkuat kebijakan efisiensi belanja dan <i>spending better</i> untuk menjaga kualitas pengelolaan APBN. <p>D. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara</p> <p>DJKN dan BLU LMAN memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan pengelolaan aset negara diarahkan untuk memberi nilai tambah terhadap perekonomian nasional dan ditunjukkan dengan indikator capaian yang terukur. 2) Pengalihan Barang Milik Negara (BMN) menjadi aset Danantara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) BLU LMAN meningkatkan nilai aset dan mendukung percepatan pendanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). <p>E. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal</p> <p>DJSEF memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Merumuskan strategi ekonomi dan fiskal untuk mendukung program direktif presiden dan agenda pembangunan nasional. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2) Memperkuat sinkronisasi dan sinergitas kebijakan fiskal dalam serangkaian siklus APBN baik pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban.</p> <p>3) Mempertajam pengelolaan belanja negara yang berkualitas di setiap K/L yang ditunjukkan dengan indikator yang terukur.</p> <p>F. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan DJSPSK memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU P2SK. 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan. <p>G. Sekretariat Jenderal dan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Setjen dan BLU LPDP memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperkuat kebijakan efisiensi dan perbaikan pola kerja baru (<i>New Ways of Working</i>) berkelanjutan dengan tetap menjaga ketercapaian <i>output</i> dan <i>outcome</i>. 2) Optimalisasi layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi. 3) BLU LPDP memastikan perluasan penerima Beasiswa yang inklusif dan afirmatif serta dapat berdampak pada peningkatan SDM nasional. 4) BLU LPDP menyampaikan <i>road map</i> penyelenggaraan beasiswa pendidikan dan jalur karir bagi peserta beasiswa LPDP. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>H. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Badan Layanan Umum Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional DJPPR dan BLU LDKPI memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tata kelola pembiayaan yang pruden dan transparan guna menjaga ketahanan dan sustainabilitas fiskal.2) Strategi pembiayaan yang fleksibel, mendorong inovasi instrumen pembiayaan berkelanjutan dan pengembangan basis investor domestik.3) Meningkatkan transparansi dalam mengelola pembiayaan pembangunan melalui utang.4) BLU LDKPI menjamin pelaksanaan kerja sama pembangunan internasional yang lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel dan berkelanjutan. <p>I. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, dan Pusat Investasi Pemerintah DJPb dan BLU BPDP, BPDLH, PIP memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Optimalisasi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kas untuk belanja yang efektif, efisien, dan berkualitas2) Meningkatkan kapasitas pengelola keuangan dan laporan keuangan yang transparan.3) BLU PIP memperkuat kolaborasi yang ditunjukkan dengan meningkatnya penyaluran yang mudah dan terjangkau, memperkuat pemberdayaan pelaku UMKM, dan pengelolaan pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan sehingga berdampak kepada peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4) BLU BPDLH mengoptimalkan akses pendanaan bagi pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi isu lingkungan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA).</p> <p>5) Meningkatkan kinerja BLU BPDP dalam mendukung pengembangan produk hilirisasi perkebunan untuk memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional.</p> <p>J. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Optimalisasi kebijakan desentralisasi fiskal, sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah serta peningkatan kualitas pengelola fiskal di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 2) Memperkuat kebijakan untuk mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan antar Pemerintahan Pusat dan Daerah, serta kesenjangan kemampuan keuangan Daerah antar Daerah. <p>K. Inspektorat Jenderal Itjen memperkuat kebijakan sebagai berikut: Pelaksanaan pengawasan terintegrasi, pemantauan dan pengawasan intensif terhadap tugas dan fungsi internal Kementerian Keuangan untuk hasil berkualitas.</p> <p>L. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan BaTii memperkuat kebijakan sebagai berikut: Penguatan pengelolaan data, informasi dan pemanfaatan teknologi yang andal dan berkualitas dalam mendukung transformasi Kementerian Keuangan yang berkesinambungan dan berdampak.</p> <p>M. Lembaga National Single Window LNSW memperkuat kebijakan sebagai berikut:</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Optimalisasi layanan publik terkait ekspor, impor, dan logistik dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan dari sisi waktu dan biaya yang diperoleh pelaku usaha.</p> <p>N. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN</p> <p>BPPK dan BLU PKN STAN memperkuat kebijakan sebagai berikut:</p> <p>Pengembangan SDM Pengelola Keuangan Negara, melalui strategi pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan modern, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan perluasan edukasi keuangan negara.</p> <p>3. <i>Key Performace Indicators (KPI)</i> Kementerian Keuangan disampaikan saat pembahasan Nota Keuangan Tahun 2026.</p> <p>4. Menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun 2026 setelah pergeseran sebesar Rp47.132.862.219.000,00 (Empat Puluh Tujuh Triliun Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan mengefisienkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp4.884.333.425.000,00 (Empat Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagai bahan penyusunan RKA K/L Kementerian Keuangan pada Nota Keuangan RAPBN Tahun 2026 dengan memperhatikan arah kebijakan efisiensi belanja negara pada tahun 2026.</p>	
5.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Rapat Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 dengan agenda Rencana Kerja dan Anggaran BPK RI Tahun 2026.	Tertutup.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025 dengan agenda Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2026 dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja).	<p>Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2026. 2. Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melanjutkan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2026 dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Panitia Kerja (Panja) Penerimaan; dan b. Panitia Kerja (Panja) Pengeluaran. 	
7.	Otoritas Jasa Keuangan	Rapat Panja Penerimaan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025 dengan agenda Pembahasan Panja Penerimaan RKA OJK Tahun 2026.	Tertutup.	
8.	Otoritas Jasa Keuangan	Rapat Panja Pengeluaran dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025 dengan agenda Pembahasan Panja Pengeluaran RKA OJK Tahun 2026.	Tertutup.	
9.	Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	Rapat Kerja Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025 dengan agenda Pengambilan Keputusan	<p>Komisi XI DPR RI dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI menyetujui penerimaan OJK Tahun 2026 sebesar Rp13.837.036.094.444,00 (Tiga Belas Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN																		
		Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2026.	Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: Berdasarkan sumber penerimaan: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pungutan</th> <th>Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 (dalam rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Proyeksi Penerimaan Tahun 2026</td> <td>8.485.717.508.600</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Proyeksi Penerimaan Saldo Tahun 2025</td> <td>5.351.318.585.844</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td><td>13.837.036.094.444</td></tr> </tbody> </table> Berdasarkan Jenis Pungutan OJK Tahun 2026: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pungutan</th> <th>Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 (dalam rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Registrasi</td> <td>72.501.880.929</td> </tr> </tbody> </table>		No	Jenis Pungutan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 (dalam rupiah)	1	Proyeksi Penerimaan Tahun 2026	8.485.717.508.600	2	Proyeksi Penerimaan Saldo Tahun 2025	5.351.318.585.844	Total		13.837.036.094.444	No	Jenis Pungutan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 (dalam rupiah)	1	Registrasi	72.501.880.929	
No	Jenis Pungutan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 (dalam rupiah)																					
1	Proyeksi Penerimaan Tahun 2026	8.485.717.508.600																					
2	Proyeksi Penerimaan Saldo Tahun 2025	5.351.318.585.844																					
Total		13.837.036.094.444																					
No	Jenis Pungutan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 (dalam rupiah)																					
1	Registrasi	72.501.880.929																					

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT			KETERANGAN
			2	Pungutan Tahunan	8.280.352.378.807	
			3	Penerimaan Lain-Lain	132.863.248.864	
				Total	8.485.717.508.600	
				Berdasarkan bidang pungutan:		
			No	Pungutan Bidang	Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 (dalam rupiah)	
			1	Perbankan	6.426.642.395.440	
			2	Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	991.332.746.961	
			3	Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun	578.629.290.483	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT			KETERANGAN
			4	Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya	354.859.826.852	
			5	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto	1.400.000.000	
			6	Penerimaan Lainnya	132.863.248.864	
			Total		8.485.717.508.600	
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisi XI DPR RI telah menerima penjelasan OJK untuk mendapatkan pendanaan Rupiah Murni sebesar Rp1.864.481.784.765,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) untuk pengadaan aset yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. <ol style="list-style-type: none"> 2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI menyetujui Proyeksi Penerimaan OJK tahun 2026 pada angka 1 (satu) termasuk dari sumber pembiayaan lainnya. 3. OJK menyelesaikan piutang Industri Jasa Keuangan untuk memperkuat penerimaan OJK. 4. OJK mengoptimalkan penerimaan OJK dari pungutan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. 5. Memajukan batas waktu pembayaran Pungutan dan Penerimaan Lainnya ke awal triwulan pada periode tahun kalender. 6. Ketentuan pada angka 5 selanjutnya akan diatur melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana 		

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																					
			<p>Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>7. Penerimaan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya, secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berdaya guna.</p> <p>8. Komisi XI DPR RI menyetujui RKA OJK Tahun 2026 sebesar Rp11.456.986.767.866,00 (Sebelas Triliun Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Kegiatan</th> <th>RKA Tahun 2026 (dalam rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kegiatan Operasional</td> <td>973.068.860.869</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kegiatan Administratif</td> <td>7.395.744.816.233</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kegiatan Pengadaan Aset</td> <td>3.088.173.090.764</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kegiatan Pendukung Lainnya</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td><td>11.456.986.767.866</td></tr> </tbody> </table> <p>Dengan RKA OJK, pada masing-masing bidang adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Bidang</th> <th>RKA Tahun 2026</th> </tr> </thead> </table>	No	Jenis Kegiatan	RKA Tahun 2026 (dalam rupiah)	1	Kegiatan Operasional	973.068.860.869	2	Kegiatan Administratif	7.395.744.816.233	3	Kegiatan Pengadaan Aset	3.088.173.090.764	4	Kegiatan Pendukung Lainnya	-	Total		11.456.986.767.866	No	Bidang	RKA Tahun 2026	
No	Jenis Kegiatan	RKA Tahun 2026 (dalam rupiah)																							
1	Kegiatan Operasional	973.068.860.869																							
2	Kegiatan Administratif	7.395.744.816.233																							
3	Kegiatan Pengadaan Aset	3.088.173.090.764																							
4	Kegiatan Pendukung Lainnya	-																							
Total		11.456.986.767.866																							
No	Bidang	RKA Tahun 2026																							

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT			KETERANGAN
					(dalam rupiah)	
1		Pengawasan Perbankan	1.400.089.878.942			
2		Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	811.287.395.648			
3		Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun	490.010.070.372			
4		Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya	367.854.047.261			
5		Pengawasan ITS, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto	151.098.739.730			
6		Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen	424.439.899.286			
7		Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas	207.640.966.874			
8		Kebijakan Strategis,	2.093.052.410.630			
	a.	Kantor OJK Pusat	381.110.207.978			

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT			KETERANGAN
				b. Kantor OJK Daerah	1.711.942.202.652	
		9	Manajemen Strategis		5.511.513.359.124	
			Total Anggaran		11.456.986.767.866	

RKA OJK masing-masing bidang telah mempertimbangkan biaya SDM, PPh 21, dan Infrastruktur informasi teknologi bidang.

9. OJK melakukan konsolidasi dalam penyediaan kantor pusat yang berada dalam satu lokasi agar lebih terintegrasi, memudahkan koordinasi dan pengawasan dalam rangka menjalankan tugas-tugas OJK sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
10. OJK menyempurnakan format rencana kerja strategis dan anggaran OJK Tahun 2026, yang meliputi:
 - a. Visi, Misi, Program Strategis, Kegiatan, IKU, dan Anggaran OJK harus selaras dengan tujuan, tugas, dan wewenang OJK sebagaimana diatur dalam UU OJK dan UU P2SK.
 - b. Program Strategis disusun secara sistematis yang berisikan keterkaitan program strategis, tujuan strategis, sasaran strategis, kegiatan, IKU, anggaran, satuan kerja, dan kegiatan.
 - c. *Roadmap* formasi efektif SDM (Sumber Daya Manusia) OJK.
 - d. *Roadmap* pengembangan sistem informasi dan teknologi OJK.
 - e. Penyempurnaan format Rencana Kerja Strategis dan RKA OJK 2026 disampaikan kepada Komisi XI DPR RI paling lambat

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Triwulan I 2026.</p> <p>11. OJK dalam membuat pengaturan Sektor Jasa Keuangan yang memuat persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan sektor jasa keuangan, wajib memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan, akses yang sama bagi semua pihak dan regulasi yang menciptakan kesempatan yang sama.</p>	
10.	Menteri Keuangan	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025 dengan agenda Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024.	<p>Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan tentang laporan keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Keuangan untuk APBN TA 2024 dan WTP yang ke-14 secara berturut-turut. 3. Menteri Keuangan wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024, serta melaporkan kinerja tindak lanjut tersebut kepada Komisi XI DPR RI. 4. Kementerian Keuangan memperkuat kebijakan dalam pengelolaan belanja negara untuk meningkatkan kualitas belanja Kementerian/Lembaga (K/L), yang ditunjukkan antara lain: khususnya anggaran pendidikan 20 persen APBN sesuai mandat konstitusi, indikator kinerja yang menunjukkan prestasi K/L dalam menjalankan belanja K/L. 5. Kementerian Keuangan meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang memenuhi prinsip-prinsip taat pada peraturan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, memenuhi rasa keadilan, dan memenuhi rasa kepatutan.	
11.	Menteri PPN/Kepala Bappenas	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025 dengan agenda Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024.	<p>Komisi XI DPR RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan tentang laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian PPN/Bappenas untuk APBN TA 2024 dan WTP yang ke-17 secara berturut-turut. 3. Menteri PPN/Kepala Bappenas wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024, serta melaporkan kinerja tindak lanjut tersebut kepada Komisi XI DPR RI. 4. Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui fungsi pengendalian, meningkatkan implementasi belanja negara yang berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), dan mengevaluasi lokus Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dari RKA seluruh K/L pada APBN. 5. Menteri PPN/Kepala Bappenas, melalui fungsi perencanaan, mempertajam penyusunan RKP dan anggaran pada Tahun Anggaran 2026, yang ditunjukkan dengan penguatan belanja prioritas, program dan kegiatan yang lebih produktif, serta menunjukkan kaitan target-target RPJMN, RKP, program K/L, dan alokasi anggarannya. 	
12.	1. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025 dengan agenda	<p>Komisi XI DPR RI bersama Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal BPK RI, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan tentang Laporan Keuangan BPK RI, BPKP, dan LKPP Tahun Anggaran 2024. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);</p> <p>3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).</p>	Laporan Keuangan BPK RI, BPKP dan LKPP Tahun Anggaran 2024.	<p>2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK RI, BPKP, dan LKPP pada Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.</p> <p>3. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal BPK RI menindaklanjuti rekomendasi Komisi XI DPR RI.</p> <p>4. Kepala BPKP dan Kepala LKPP wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan BPKP, dan LKPP Tahun Anggaran 2024, serta melaporkan kinerja tindak lanjut tersebut kepada Komisi XI DPR RI.</p> <p>5. BPK meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas.</p> <p>6. BPKP memperkuat dan meningkatkan pengawasan pembangunan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, mengoptimalkan penerimaan Negara/Daerah, penyelenggaraan belanja yang efektif dan efisien, dan tata kelola pengawasan yang unggul, akuntabel, dan sehat.</p> <p>7. LKPP meningkatkan kebijakan pengadaan barang/jasa yang mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat porsi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Koperasi dalam penyediaan barang/jasa.</p>	
13.	<p>1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN);</p> <p>2. Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (DANANTARA).</p>	<p>Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025 dengan agenda:</p> <p>1. Pengenalan Tugas dan Fungsi Badan</p>	Tertutup.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> Pengelola Investasi (BPI) Danantara; dan Pemaparan <i>roadmap</i> serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) <i>Holding</i> Investasi. 		

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025 dengan agenda Laporan Panja Penerimaan, Laporan Panja Pengeluaran, dan lain-lain.	Tertutup.	
2.	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi (Persero); Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero); Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero); Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT. 	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan tanggal 23 Juli 2025 dengan agenda Kinerja <i>Special Mission Vehicle</i> (SMV) Semester I Tahun 2025.	<p>Komisi XI DPR RI bersama dengan Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI), Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF), Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII), Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi (Persero), dan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menyetujui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan Direktur Utama SMI, SMF, PII, Geo Dipa Energi, dan LPEI mengenai kinerja masing-masing <i>Special Mission Vehicle</i> Kementerian Keuangan Semester I Tahun 2025. SMI, SMF, PII, Geo Dipa Energi, dan LPEI sebagai <i>Special Mission Vehicle</i> menjalankan penugasan sejalan dengan Visi - Misi Presiden 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); dan</p> <p>5. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia</p>		<p>Asta Cita dalam RPJMN 2025 – 2029.</p> <p>3. SMI, SMF, PII, Geo Dipa Energi, dan LPEI meningkatkan kinerja perusahaan yg ditunjukan dengan pencapaian kinerja keuangan dan kontribusi pada pendapatan negara yang optimal.</p> <p>4. SMI mengoptimalkan pembiayaan infrastruktur melalui pembiayaan daerah agar tercipta pemerataan pembangunan di daerah.</p> <p>5. SMF meningkatkan kinerja sebagai <i>liquidity provider</i> dan pembiayaan sekunder perumahan yang ditunjukan dengan penyediaan pendanaan jangka Panjang dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan memberikan <i>multiplier effect</i> pada sektor riil.</p> <p>6. PII meningkatkan kinerja dalam memastikan penjaminan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur yang ditunjukkan dengan manajemen risiko serta mengoptimalkan penjaminan yang efisien.</p> <p>7. Geo Dipa Energi meningkatkan kinerja dalam penguatan kapasitas produksi diantaranya melalui investasi terhadap riset, inovasi, dan teknologi untuk mengekselerasi pengembangan energi baru dan terbarukan.</p> <p>8. LPEI meningkatkan kinerja dalam memastikan terlaksananya penyaluran pembiayaan yang berkualitas dan memastikan pelaksanaan Program Khusus Ekspor (PKE) dapat berkontribusi dalam meningkatkan devisa yang ditunjukan dengan perbaikan bisnis model berdasarkan prinsip <i>Governance, Risk, and Compliance</i>.</p> <p>9. Direktur Utama SMI, SMF, PII, Geo Dipa Energi, dan LPEI memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan/tanggapan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR paling lambat 7 (tujuh hari kerja).</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Migas dan RUU Ketenagalistrikan	Rapat Intern dengan menghadirkan Plt. Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta jajaran dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 pukul 11.00 WIB.	1. Penyerahan NA dan Draft RUU Migas 2. Penyerahan NA dan Draft RUU Ketenagalistrikan	
2.	RUU Migas	RDPU dengan Pakar RUU Migas dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.	Masukan dari Pakar terhadap Draft RUU Migas.	
3.	RUU Ketenagalistrikan	RDPU dengan Pakar RUU Ketenagalistrikan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 pukul 15.00 WIB.	Masukan dari Pakar terhadap Draft RUU Ketenagalistrikan.	
4.	RUU EBET	RDP dengan Sekjen KESDM RI dan Dirjen EBTKE KESDM RI dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.	Pembahasan lanjutan <i>carry over</i> RUU EBET.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Eselon I Kementerian ESDM	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah.	Membicarakan kelanjutan program kemasyarakatan ESDM RI.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		RDP dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.		
2.	Eselon I Kementerian ESDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. <p>RDP dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 pukul 11.00 WIB.</p>	<p>Melanjutkan pembahasan RKA K/L dan RKP TA 2026.</p>	
3.	Menteri ESDM RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. <p>Raker dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan RKA-K/L dan RKP TA. 2026. 2. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024. 	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. <p>Dilaksanakan pada tanggal 11-13 Juli 2025.</p>	<p>Kunjungan kerja spesifik komisi XII ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Provinsi Sumatera Barat 3. Provinsi Jawa Timur 	
2.	Kepala Desa Kec. Tanah Grogot Provinsi Kalimantan timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 	Penyampaian aspirasi Kepala Desa.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		3. Kebijakan Pemerintah. Audiensi dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025, pukul 11.00 WIB.		
3.	Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Manusela Prima Mining	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP dan RDPU dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.	1. Tindaklanjut laporan masyarakat yang berkaitan dengan masalah perizinan sengketa lahan masyarakat dan dampak lingkungan. 2. Lain-lain.	
4.	Plt. Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta jajaran	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Rapat Intern dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.	1. Penyerahan NA dan Draft RUU Migas. 2. Penyerahan NA dan Draft RUU Ketenagalistrikan.	
5.	Dirut MIND ID, Dirut PT Antam Tbk, Dirut PT Bukit Asam Tbk, Dirut PT Freeport, Dirut PT Vale, dan Dirut PT Inalum	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah.	1. Strategi percepatan hilirisasi. 2. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan pertambangan. 3. Progres reklamasi pasca tambang. 4. Lain-lain.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		RDP dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025 pukul 10.00 WIB.		
6.	Deputi Bidang Gakkum KLH dengan menghadirkan Dirut PT Jui Shin, Dirut Sumatera Tobacco Trading Company, Dirut PT Permata Hijau Palm Oleo, Dirut PT Waruna Shipyard Indonesia, Dirut PT Sinar Anugerah Sejahtera (SAS), Dirut PT RMK Energy Tbk (RMKE), Dirut PT Riau Andalan Pulp & Paper, Dirut PT Indomining, Dirut PT Energi Unggul Persada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. <p>RDP dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindaklanjut hasil kunjungan Komisi XII DPR RI. 2. Lain-lain. 	
7.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. <p>Dilaksanakan pada tanggal 17-19 Juli 2025.</p>	<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Jawa Timur 3. Maluku Utara 	
8.	Sekjen DEN, Kepala BRIN, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, Kepala BAPETEN dan Dirut PT INUKI (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. <p>RDP dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 11.00 WIB.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Permasalahan Pengalihan aset PT INUKI (Persero) ke BRIN 2. Lain-lain. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
9.	Pakar RUU Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan undang-undang;2. Pelaksanaan keuangan negara;3. Kebijakan Pemerintah. <p>RDPU Panja Minerba dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.</p>	Masukan dari Pakar terhadap Draft RUU Ketenagalistrikan.	
10.	Ketua Umum ASPERMIGAS dan Presiden IPA	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan undang-undang;2. Pelaksanaan keuangan negara;3. Kebijakan Pemerintah. <p>RDPU dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.</p>	Masukan dari pakar terhadap Draft RUU Migas.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Perubahan Kedua UU Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban	Kunspek legislasi dilaksanakan tgl Selasa – Kamis 1-3 Juli 2025 Ke: 1. Provinsi BaBel 2. Provinsi Riau 3. Provinsi Kep. Riau	Mendapatkan Masukan atas Rencana Penyusunan RUU Perubahan Kedua UU Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban Dari para stakeholder di daerah.	Dari para stakeholder di daerah.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian IMIPAS	Pembahasan RKA dan RKP K/L Kementerian IMIPAS Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada Kamis, 10 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	Tertutup	
2.	Sekjend DPD	Pembahasan RKA dan RKP K/L DPD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada Kamis, 10 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.	Tertutup	
3.	Sekjen MPR	Pembahasan RKA dan RKP K/L MPR RI Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada Kamis, 10 Juli 2025, pukul 15.30 WIB.	Tertutup	
4.	Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia	Audiensi dilaksanakan pada Senin 14 Juli 2025 pukul 10.00 WIB.	Tertutup	
5.	Pelajar Palestine	Audiensi dilaksanakan pada Senin 14 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.	Tertutup	
6.	Yayasan Pesantren Indonesia	Audiensi dilaksanakan pada Senin 14 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.	Tertutup	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Kementrian HAM	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 Kementrian HAM dilaksanakan pada Rabu 16 Juli 2025 pukul 10.00 WIB.	Terbuka	
8.	Kementrian Hukum	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 Kementrian Hukum dilaksanakan pada Rabu 16 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.	Terbuka	
9.	LPSK	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 LPSK dilaksanakan pada Rabu 16 Juli 2025 pukul 15.00 WIB.	Terbuka	
10.	Kementrian Sekretariat Negara	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 Sekretariat Negara dilaksanakan pada Kamis 17 Juli 2025 pukul 10.00 WIB.	Terbuka	
11.	BPIP	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 BPIP dilaksanakan pada Kamis 17 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.	Terbuka	
12.	BNPT	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 BNPT dilaksanakan pada Kamis 17 Juli 2025 pukul 15.00 WIB.	Terbuka	
13.	Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII Yogyakarta	Audiensi dengan Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII Yogyakarta (Visit Lembaga) dilaksanakan pada Senin 21 Juli 2025 pukul 09.00 WIB.	Terbuka	
14.	Kementrian IMIPAS	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 Kementrian IMIPAS dilaksanakan pada Senin 21 Juli 2025 pukul 10.00 WIB.	Terbuka	
15.	Sekjen DPD	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 DPD RI dilaksanakan pada Senin 21 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.	Terbuka	
16.	Sekjen MPR	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 MPR RI dilaksanakan pada Senin 21 Juli 2025 pukul 15.30 WIB.	Terbuka	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat intern	Rekapitulasi hasil pembahasan RKA dan RKP K/L Mitra Kerja Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Senin, 10 Juli 2025.	Tertutup	
2.	Kunspek Komisi XIII dalam rangka Pelaksanaan fungsi pengawasan	Kunspek Legislasi dilaksanakan hari Jumat-Minggu, 18-20 Juli 2025 ke: <ul style="list-style-type: none">• Provinsi Jateng• Provinsi DIY• Provinsi Bali	Kunspek Komisi XIII dalam rangka Pelaksanaan fungsi pengawasan ke kantor wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.	
3.	Rapat Intern	Rekapitulasi Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 Mitra Kerja dilaksanakan pada hari Senin, 21 Juli 2025.	Tertutup	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	UU No. 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani	Kunjungan Kerja dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan ke Provinsi Lampung pada 14-15 Juli 2025.	<p>Kesimpulan Temuan dan Rekomendasi Badan Legislasi DPR RI terkait UU Pelindungan dan Pemberdayaan Petani.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan <i>juncto</i> Pasal 66 huruf h Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib <i>juncto</i> Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi DPR RI mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah melaksanakan fungsi pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani. Kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada 14-15 Juli 2025 mengungkapkan beberapa permasalahan krusial yang dihadapi petani ubi kayu, terutama terkait harga yang tidak stabil, kualitas tidak seragam, kelebihan pasokan, impor, dan ketergantungan pada industri tapioka.2. Meskipun Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Instruksi Gubernur terkait harga ubi kayu, belum adanya standar harga nasional menyebabkan harga di luar Lampung lebih murah dan hasil panen lokal tidak terserap optimal. Kondisi ini diperparah oleh impor tapioka dan ubi	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kayu yang menekan harga jual petani, serta data yang tidak sinkron yang memicu kebijakan impor merugikan. Petani juga menghadapi kesulitan dalam negosiasi harga dan minimnya diversifikasi produk turunan ubi kayu, sehingga nilai tambah yang mereka peroleh rendah.</p> <p>3. Menyikapi permasalahan ini, Baleg DPR RI merekomendasikan hilirisasi dan diversifikasi produk ubi kayu, pengkajian ulang kebijakan impor tapioka, peningkatan produktivitas petani melalui teknologi dan bibit unggul, serta dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, teknologi, dan akses pembiayaan. Baleg juga meminta Komisi IV untuk mengawasi tata kelola pertanian ubi kayu dan berencana mengundang Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Pertanian untuk rapat kerja terkait pemantauan UU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani.</p>	
2.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	RDPU dilaksanakan pada Rabu, 16 Juli 2025 pukul 14.28 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan RDPU dalam rangka penyusunan RUU tentang BPIP dengan Wakil Kepala BPIP, Kepala Pusat Kajian Pancasila UGM, Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ, Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.H, dan Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas anggota Baleg menyatakan keprihatinan terhadap kemerosotan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Mereka menekankan pentingnya penguatan BPIP sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menginternalisasikan ideologi Pancasila. 2. Beberapa anggota mengusulkan agar BPIP ditingkatkan statusnya setara dengan kementerian agar lebih efektif dan memiliki kewenangan yang jelas. Namun, penguatan ini harus tetap memperhatikan batasan agar tidak masuk ke ranah ekonomi atau menjadi "polisi ideologi". 3. Terdapat kekhawatiran bahwa BPIP bisa menjadi alat kontrol ideologi. Oleh karena itu, disarankan agar BPIP berfungsi sebagai fasilitator dalam 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>internalisasi nilai-nilai Pancasila, bukan sebagai pengawas atau penegak ideologi.</p> <p>4. Beberapa anggota mempertanyakan efektivitas BPIP yang dibentuk melalui Perpres, serta kontribusinya terhadap kehidupan sosial dan politik saat ini. Ada dorongan agar BPIP lebih responsif terhadap isu-isu aktual seperti kualitas demokrasi dan kehidupan bermasyarakat.</p> <p>5. Ditekankan bahwa pendekatan BPIP harus relevan dengan generasi muda (seperti Gen Z) dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis mereka. Nilai-nilai Pancasila harus bisa hidup dan selaras dengan perkembangan zaman.</p> <p>Proses penyusunan RUU BPIP harus melibatkan diskusi terbuka dari berbagai elemen masyarakat, dari Sabang sampai Merauke, agar tidak menjadi simplifikasi dari Perpres yang sudah ada.</p>	
3.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	RDPU dilaksanakan pada Rabu, 16 Juli 2025 pukul WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan RDPU dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dengan Presiden Executive Commitee Pusat Partai Buruh.</p> <p>Kesimpulan:</p> <p>Seluruh masukan yang disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan bagi Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.</p>	
4.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	Diplomasi Parlemen pada tanggal 17-23 Juli 2025.	Dalam rangka Pemantauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ke Afrika Selatan dan Madagaskar.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	Rapat Pembentukan Indonesia – Palestine <i>Friendship Society</i> dilaksanakan pada 10 Juli 2025.	Pimpinan BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) dan Ravindra Airlangga (F-PG) memimpin Rapat Pembentukan Indonesia – Palestine <i>Friendship Society</i> bersama dengan perwakilan fraksi DPR dan sejumlah perwakilan organisasi – organisasi peduli Palestina di R. Diplomasi, Gd. Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta.	
2.	KSR - BKSAP	Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza – Palestina dalam rangka memperingati 70 tahun KAA dilaksanakan pada 12 Juli 2025.	Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (F-PKS), menghadiri dan membuka kegiatan Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza-Palestina dalam rangka Memperingati 70 Tahun KAA di Gedung Merdeka, Bandung (12/7). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota BKSAP DPR RI, Melly Goeslaw (F-PGerindra), Verrell Bramasta (F-PAN) dan Hillary Brigitte Lasut (F-PD). Konferensi terdiri dari tiga sesi utama yaitu diskusi panel, <i>talkshow</i> dan FGD, serta Pembacaan dan Penandatanganan Deklarasi Pemuda Indonesia untuk Gaza Palestina yang merupakan puncak kegiatan. Deklarasi ini menjadi manifestasi konkret dari semangat solidaritas dan aksi berkelanjutan pemuda Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.	
3.	KSR - BKSAP	Sidang ke-16 AIPA Caucus di Phnom Penh, Kerajaan Kamboja dilaksanakan pada 13 – 17 Juli 2025.	Sidang ke-16 AIPA Caucus diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2025 di Phnom Penh, Kamboja, yang dihadiri oleh delegasi parlemen dari negara-negara ASEAN serta 10 negara <i>observer</i> . Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Mardani Ali Sera, Ketua BKSAP DPR RI, yang didampingi oleh anggota BKSAP lainnya, Ravindra Airlangga (F-PGolkar) dan Dede Indra Permana Soediro (F-PDIP). Dalam sidang yang mengangkat tema <i>Strengthening Parliamentary Contributions to Regional and Global Peace and Security</i> , Dr. Mardani Ali Sera menyampaikan intervensi yang mendalam mengenai peran strategis parlemen, khususnya	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Indonesia, dalam menjaga perdamaian dan keamanan global yang semakin kompleks.</p> <p>Dr. Mardani menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang teguh terhadap diplomasi bebas dan aktif, yang tidak memihak dan selalu mengutamakan dialog serta mediasi dalam penyelesaian konflik. Indonesia telah membuktikan komitmennya melalui kontribusi nyata dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk pengiriman Pasukan Garuda ke berbagai zona konflik di Timur Tengah dan Afrika.</p> <p>Lebih lanjut, Dr. Mardani menyampaikan bahwa ketegangan yang terjadi di berbagai belahan dunia—termasuk di kawasan ASEAN—membutuhkan perhatian bersama. Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bersatu dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan sosial, kelangkaan sumber daya, dan ketidakstabilan politik.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, Indonesia juga mengajak seluruh parlemen ASEAN untuk memperkuat dialog antar-parlemen sebagai salah satu langkah strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perdamaian berkelanjutan.</p> <p>Melalui dialog ini, Indonesia kembali mengingatkan akan pentingnya kerja sama antar-parlemen, tidak hanya di kawasan ASEAN tetapi juga dengan mitra eksternal untuk membangun dunia yang lebih baik, dengan aksi konkret yang berdampak langsung pada stabilitas keamanan regional dan global.</p>	
4.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSBDPR RI – Parlemen Papua Nugini dilaksanakan pada 15 Juli 2025.	<p>Ketua GKSBDPR RI - Parlemen Papua Nugini, Khilmi (F-PGerindra) memimpin Rapat Internal guna membahas program dan rencana kegiatan GKSBDPR RI - Parlemen Papua Nugini. (15/07/2025).</p> <p>Pertemuan juga membahas rencana kunjungan GKSBDPR RI - Parlemen Papua Nugini yang akan diadakan pada akhir tahun ini. Turut hadir dalam rapat tersebut, Anggota GKSBDPR RI - Parlemen Papua Nugini, Sarmuji (F-PG).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSBDPR RI – Parlemen Uruguay dilaksanakan pada 15 Juli 2025.	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSBDPR RI - Parlemen Uruguay) menggelar rapat internal sebagai langkah awal mempersiapkan agenda kegiatan Delegasi GKSBDPR RI - Parlemen Uruguay, pada (15/7/2025).</p> <p>Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua GKSBDPR RI (F-PG) dan Anggota GKSBDPR RI Novita Hardini (F-PDIP), tersebut menyepakati waktu kunjungan yang akan berlangsung pada Oktober 2025 mendatang.</p> <p>Delegasi juga akan menjadwalkan pertemuan dengan sejumlah pihak antara lain: Parlemen, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum atau Direktorat Imigrasi.</p>	
6.	KSB - BKSAP	Dialog Kopi Parlemen dilaksanakan pada 17 Juli 2025.	<p>BKSAP DPR RI bersama Kedutaan Besar Uni Eropa mengadakan Dialog Kopi Parlemen pada hari Kamis (17/07/2025).</p> <p>Kegiatan ini bertujuan untuk menjadi forum jejaring antara Anggota Parlemen, Pekerja Parlemen dengan Pihak - Pihak Uni Eropa termasuk Parlemen Eropa. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BKSAP, Duta Besar Uni Eropa, Duta Besar negara - negara anggota Uni Eropa, pejabat - pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI, Pejabat dan Staf Biro KSAP dan OI serta Sekretariat AIPA.</p> <p>Pertemuan dihadiri oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga (F-PG), Anggota BKSAP DPR RI, Robert Joppy Kardanila (F-PG).</p>	
7.	KSR - BKSAP	Kunjungan Panja Open Government-Parliament (OG-P) ke Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur	<p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI selaku Ketua Panja OGP, Muhammad Husein Fadulloh (F-PG), bersama Anggota Panja OG-P, Eva Monalisa (F-PKB), Verrell Bramasta (F-PAN) dan Fathi (F-PD) berdiskusi secara langsung dengan Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono beserta jajarannya.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dilaksanakan pada 17 Juli 2025.	<p>Panja Open Government - Parliament BKSAP DPR RI mengajak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terlibat aktif pada agenda <i>Open Government Partnership</i> (OGP) untuk peningkatan pelayanan publik dan transformasi digital di IKN pada tanggal 17 Juli 2025. Terlebih IKN telah memiliki cetak biru <i>smart city</i>. Dalam diskusinya, Panja OGP mengajak OIKN terlibat di OGP <i>Locals</i> sejalan dengan UU No 21 Tahun 2023 dan disambut baik oleh Kepala OIKN.</p> <p>BKSAP mendorong dan mengadvokasi kembali nilai-nilai OGP dan OPI dengan mendorong entitas eksekutif baik pusat dan daerah untuk menjaga prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabilitas hingga partisipasi publik dalam tata kelola dan penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Ketua Otorita IKN menyambut baik usulan untuk terlibat aktif pada agenda <i>Open Government Partnership</i> dan siap untuk mengusung prinsip-prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	
8.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> GKSBDPR RI – Parlemen Peru dilaksanakan pada 21 Juli 2025.	<p>GKSBDPR RI - Parlemen Peru yang dipimpin oleh Ketua GKSBDPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menerima <i>Courtesy Call</i> Duta Besar Peru untuk Indonesia, H.E. Mr. Luis Tsuboyama Galvan pada hari Senin (21/07/2025).</p> <p>Pada pertemuan tersebut, selain membahas upaya penguatan hubungan bilateral antara RI dan Peru pada bidang perdagangan, pariwisata, infrastruktur, pendidikan, energi dan anti-narkotika, kedua pihak juga membahas rencana kunjungan Presiden Peru, H.E. Dina Boluarte ke Indonesia pada bulan Agustus. Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai kunjungan balasan terhadap kunjungan Presiden Prabowo pada November 2024. Dalam kunjungan tersebut rencananya Presiden Peru akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Peru dan Menteri Perdagangan Peru guna menindaklanjuti Indonesia - Peru <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IP-CEPA) serta perjanjian kerja sama lainnya.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>GKS Perú tentu menyambut baik rencana kunjungan tersebut serta menyatakan pentingnya hubungan baik antara DPR RI dan Parlemen Perú guna menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat kedua negara. Ketua GKS Perú, Irine Yusiana Roba Putri pihaknya siap mendukung agar kunjungan Presiden Perú ke Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan tersebut Dubes Perú juga mengundang GKS Perú untuk dapat segera berkunjung ke Perú agar dapat segera bertemu dengan Parlemen Perú serta Institusi negara lainnya guna menggali potensi kerja sama antar RI dan Perú.</p> <p>Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota GKS DPR RI - Parlemen Perú, Junico Siahaan (F-PDIP), Gilang Dhielafararez (F-PDIP), Marinus Gea (F-PDIP) dan Edi Purwanto (F-PDIP)</p>	
9.	KSI - BKSAP	<i>Parliamentary Forum on United Nations High Level Political Forum (UN HLPF) 2025, New York, Amerika Serikat dilaksanakan pada 22 Juli 2025.</i>	<p>Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan sambutan di forum laporan tahunan pencapaian SDGs di Markas Besar PBB, New York (22 Juli 2025). Bersama dengan Wakil Menteri Bappenas, Mardani mengapresiasi pencapaian pemerintah dalam implementasi program pembangunan berkelanjutan.</p> <p>DPR RI telah menjadi partner bagi pemerintah dalam penyusunan <i>Voluntary National Report</i> (VNR) selama 4 tahun terakhir. Dan akan terus berperan aktif dalam berkontribusi dan mengawasi jalannya program SDGs ini. Dunia masih memiliki sisa 5 tahun hingga 2030, dan DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung dan mendorong percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.</p> <p>Progres SDG5 tentang kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan secara global masih rendah. Amelia Anggraini, Anggota BKSAP DPR RI, menyampaikan keprihatinannya bahwa perempuan menjadi korban terbanyak dalam perang seperti di Ukraina dan terutama di Palestina. Dalam pertemuan antar palemen pada HLPF 2025 di Markas Besar PBB, New York (22 Juli 2025), politisi Partai Nasdem menyatakan pentingnya peran</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>parlemen untuk mendorong dan memastikan implementasi pengarusutamaan kesetaraan gender dilaksanakan di berbagai bidang.</p> <p>Amelia menegaskan, kesetaraan gender tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan, tetapi untuk seluruh masyarakat. Parlemen siap untuk menjadi wadah dimana suara perempuan didengar, diapresiasi, dan diperhitungkan. Memastikan menjadi sehat dan akses kesehatan memadai untuk semua adalah tujuan utama dari pertemuan antar parlemen dalam HLPF 2025 di New York. Pada pertemuan ini, anggota BKSAP, Surya Pratama menyampaikan bahwa parlemen memiliki peran penting dalam formulasi regulasi, penetapan anggaran, dan pengawasan program agar dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan.</p> <p>Penguatan sistem kesehatan telah dilakukan DPR RI melalui penetapan UU NO. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan dan UU No. 18 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Parlemen berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar akses terhadap fasilitas kesehatan dapat menjangkau semua masyarakat. Menjadi sehat bukanlah sebuah keistimewaan, melainkan hak dasar semua manusia.</p>	
10.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKS B Makedonia dilaksanakan pada 22 Juli 2025.	<p>GKS B Macedonia yang dipimpin oleh Ketua GKS B Makedonia, Rico Sia (F-PAN) memimpin Rapat Internal GKS B Makedonia guna membahas program kerja dan rencana kunjungan GKS B ke Makedonia.</p> <p>Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota GKS B Makedonia, Elita Budiati (F-PG).</p>	
11.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKS B Slovakia dilaksanakan pada 23 Juli 2025.	<p>GKS B Slovakia yang dipimpin oleh Ketua GKS B Makedonia, Ahmad Rizky Sadig (F-PNasdem) memimpin Rapat Internal GKS B Slovakia guna membahas program kerja dan rencana kunjungan GKS B ke Slovakia.</p> <p>Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota GKS B Slovakia, Wardatul Asriyah (F-PGerindra), Lale Syifaun Nufus (F-PGerindra).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
12.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> GKS B Uruguay dengan Duta Besar Uruguay dilaksanakan pada 23 Juli 2025.	<p>GKS B DPR RI – Parlemen Uruguay yang dipimpin oleh Ketua GKS B Uruguay, Yan Permenas Mandanas (F-PGerindra) menerima Duta Besar Uruguay, H.E. Ms. Cristina Gonzalez pada hari Rabu (23/05/25) di Gedung Nusantara III Lt.6.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut kedua pihak membahas upaya penguatan kerja sama bilateral antara RI – Uruguay dalam berbagai bidang khususnya pada kerja sama antar-parlemen. Duta Besar juga mengundang GKS B Uruguay untuk berkunjung guna menggali potensi kerja sama antara Indonesia dan Uruguay serta menyatakan pihaknya siap mendukung kerja sama antara DPR RI – Parlemen Uruguay.</p> <p>Turut hadir dalam pertemuan tersebut Novita Hardini (F-PDIP), Nanang Samodra (F-PD), Syarif Fasha (F-PNasdem).</p>	
13.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKS B Bulgaria dilaksanakan pada 24 Juli 2025.	GKS B Slovakia yang dipimpin oleh Ketua GKS B Bulgaria, Nihayatul Wafiroh (F-PKB) memimpin Rapat Internal GKS B Bulgaria guna membahas program kerja dan rencana kunjungan GKS B ke Bulgaria.	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Polres Cimahi/Provinsi Jawa Barat	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dilaksanakan pada hari Rabu – Jumat, 9 s.d 11 Juli 2025.	Melaksanakan Tugas dan Fungsi terkait Sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara MKD dan Sosialisasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI, ke Polres Cimahi.	
2.	DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	Rapat Audiensi dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025.	Dalam rangka konsultasi terkait Tugas, Fungsi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam penegakan kode etik dan pelaksanaan tata beracara Badan Kehormatan.	
3.	-	Rapat Paket <i>Meeting</i> Griya Sabha Kopo dilaksanakan pada hari Sabtu – Senin, 12 s.d 14 Juli 2025.	Paket <i>Meeting</i> dengan tema “Etika politik dalam pemenuhan hak sipil dan politik” di Griya Sabha Kopo.	
4.	-	Rapat Intern dilaksanakan pada hari Senin, 14 Juli 2025.	Dalam rangka mendengarkan keterangan pengadu terkait perkara nomor register 33/PP/VI/2025.	
5.	-	Rapat Intern dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Juli 2025.	Rapat Penetapan Pimpinan Yang Terhormat Drs. H. Adang Daradjatun/A.451/F.PKS, sebagai Wakil Ketua MKD.	
6.	-	Sidang dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Juli 2025.	Terkait perkara nomor register 33/PP/VI/2025.	
7.	Polrestabes Surabaya	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dilaksanakan pada hari Rabu – Jumat, 16 s.d 18 Juli 2025.	Melaksanakan Tugas dan Fungsi terkait Sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara MKD dan Sosialisasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI, ke Polrestabes Surabaya.	
8.		Rapat Intern dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juli 2025.	Penyelidikan terkait Perkara Nomor Register 34/PP/VII/2025 dan 35/PP/VII/2025.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
9.	Kakortas Tipidkor POLRI	Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juli 2025.	Penyelidikan terkait Perkara Nomor Register 34/PP/VII/2025 dan 35/PP/VII/2025.	
10.	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	Rapat Audiensi dilaksanakan pada hari Senin, 21 Juli 2025.	Dalam rangka konsultasi terkait Tugas, Fungsi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.	
11.		Rapat Paket <i>Meeting</i> Griya Sabha Kopo dilaksanakan pada hari Senin – Rabu, 21 s.d. 23 Juli 2025.	Paket <i>Meeting</i> dengan tema “Etika Politik dalam Pemenuhan Partisipasi Publik” di Griya Sabha Kopo.	
12.	DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Rapat Audiensi dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Juli 2025.	Dalam rangka konsultasi terkait Tugas, Fungsi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri -	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka keprotokolan, Tanggal 10-12 Juli 2025 ke Stasiun Tugu, Yogyakarta.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri BURT DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan di stasiun untuk: <ol style="list-style-type: none">Memastikan pelaksanaan keprotokolan sesuai ketentuan peraturan.Meninjau ketersediaan dan kesiapan sarana/prasarana di stasiun agar pelaksanaan keprotokolan berjalan lancar.	
2.		Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama: <ol style="list-style-type: none">Tanggal 13-15 Juli 2025 ke Jambi.Tanggal 16-18 Juli 2025 ke Bali.Tanggal 19-22 Juli 2025 ke Aceh.	Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none">Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama.Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	
3.	Setjen DPR RI	Rapat BURT dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Juli 2025. Agenda: Nota Penjelasan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang RKA DPR RI Tahun 2026 Berdasarkan Pagu Indikatif	Realisasi Anggaran DPR RI sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 Rp.2.782.452.299.020,- (<i>Dua triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah</i>).	
4.		Rapat Panja BURT dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Juli 2025. Agenda: 1. Pendalaman Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan II Tahun 2025 Satker Dewan. 2. Pendalaman Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan II Tahun 2025 Satker Setjen.	1. Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan II Tahun 2025 Satker Dewan Rp.2.035.151.652.787,- (<i>Dua triliun tiga puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah</i>) atau 39,83% dari Pagu Rp.5.109.747.073.000,- (<i>Lima triliun seratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah</i>). 2. Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan II Tahun 2025 Satker Setjen Rp.747.300.646.233,- (<i>Tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah</i>) atau 50,29% dari Pagu Rp.1.486.002.219.000,- (<i>Satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah</i>).	
5.		Rapat BURT dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Juli 2025.	1. Laporan Panja Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan II Tahun 2025 Satker Dewan. 2. Laporan Panja Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan II Tahun 2025 Satker Setjen.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Kementerian Keuangan	Rapat Panja dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025.	- Panja Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2026. - Panja Transfer ke Daerah RAPBN 2026.	
2	Kementerian Keuangan	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025.	Raker penyampaian Pokok-pokok RUU P2 APBN TA 2024 dan Pembentukan panja-panja.	
3	Kementerian Keuangan	Rapat Timus dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025.	Timus Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2026.	
4	• Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian Keuangan	Rapat Timus dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025.	Timus RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2026.	
5	Kementerian Keuangan	Rapat Timus dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025.	- Timus Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2026. - Timus Transfer ke Daerah RAPBN 2026.	
6	Kementerian Keuangan	Rapat Panja dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025.	- Rapat Panja Perumus Kesimpulan RUU P2 APBN TA 2024. - Rapat Panja Draft RUU P2 APBN TA 2024.	
7	• Kementerian Keuangan • Bappenas • Bank Indonesia	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025.	Rapat Kerja Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-panja dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2026 dan RKP Tahun 2026.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ul style="list-style-type: none">– BAKN DPR RI– Contraloria General del Estado– Comisión de Fiscalización y Control Político	Kunjungan Kerja Luar Negeri dilaksanakan pada 15 s.d. 21 Juli 2025.	<p>Kunjungan kerja BAKN ke negara Ekuador dilaksanakan dalam rangka memperoleh pemahaman dan pembelajaran mengenai sistem pengawasan keuangan negara, khususnya peran <i>Contraloria General del Estado</i> dan <i>Comisión de Fiscalización y Control Político</i> dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.</p> <p>Kesimpulan hasil kunjungan kerja antara lain sebagai berikut:</p> <p>Memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait hal-hal sebagai berikut:</p> <p><i>Contraloria General del Estado</i></p> <p><i>Contraloría General Del Estado</i> merupakan bagian penting dari sistem transparansi dan pengawasan tata kelola publik di Republik Ekuador yang berfungsi sebagai badan pengawasan yang independen dari struktur pemerintahan. Pada reformasi kelembagaan yang diperkuat dalam Konstitusi 1979 dan 2008, mengakui Kantor Pengawas sebagai badan teknis dan otonom dalam struktur Cabang Transparansi dan Pengawasan Sosial, menjadikannya otoritas tertinggi dalam pengawasan sumber daya negara.</p> <p>Misi dari <i>Contraloría General Del Estado</i> mendorong dan mengawasi penggunaan sumber daya publik yang efisien dan efektif melalui layanan audit dan nasihat pemerintahan, demi memperkuat administrasi publik untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian visinya adalah menjadi lembaga terdepan dalam transparansi dan pemberantasan korupsi.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Nilai-nilai institusional dalam <i>Contraloría General Del Estado</i> adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Integritas✓ Independensi dan objektivitas✓ Kompetensi✓ Etika professional✓ Kerahasiaan dan transparansi <p>Pilar Strategis dalam <i>Contraloría General Del Estado</i> adalah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dan penilaian2. Transparansi dan akuntabilitas3. Inovasi teknologi4. Sumber daya dan proses5. Partisipasi warga negara. <p>Dalam menjalankan tugasnya <i>Contraloría General Del Estado</i> mempunyai tujuan strategis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan akses dan penggunaan informasi manajemen pengawasan dalam administrasi publik2. Memperkuat komunikasi yang terbuka, transparan, dan mudah dipahami3. Mendorong integritas di sektor publik4. Meningkatkan partisipasi warga dalam pengawasan publik5. Memanfaatkan teknologi baru untuk penguatan kelembagaan6. Meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas7. Memperkuat kapasitas kelembagaan. <p><i>Contraloría General Del Estado</i> selalu menjalin hubungan fungsional dengan Majelis Nasional melalui pengawasan politik dan permintaan informasi, dukungan teknis dan hukum, serta pemaparan teknis di hadapan komisi legislatif.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>Comisión de Fiscalización y Control Político</i></p> <p>Dalam Kerangka Normatif Fungsi Pengawasan, Konstitusi Republik Ekuador mempunyai kewenangan mengawasi tindakan dari semua fungsi negara dan meminta informasi dari pejabat publik dan menyetujui Anggaran Umum Negara dan mengawasi pelaksanaannya.</p> <p>Sedangkan kewenangan Kantor Pengawas Umum Negara (<i>Contraloría General del Estado</i>) adalah mengawasi penggunaan sumber daya publik dan pencapaian tujuan negara dengan fungsi utama memimpin sistem pengawasan administratif, menentukan tanggung jawab dan mengeluarkan indikasi tanggung jawab pidana, mengeluarkan peraturan pengawasan dan memberi nasihat kepada lembaga negara.</p> <p>Fungsi Legislatif dalam Parlemen Ekuador, Majelis Nasional mempunyai kewenangan mengawasi semua fungsi negara, menyetujui dan mengawasi Anggaran Umum Negara, menyetujui pembentukan komisi khusus, dan memerintahkan pemanggilan untuk hadir di Sidang Paripurna untuk tujuan informatif.</p> <p>Komisi Pengawasan dan Pengendalian Politik juga berperan dalam proses pemakzulan politik, kasus penolakan pemberian informasi, permintaan pengawasan dari warga negara atau anggota parlemen, dan proses yang ditugaskan oleh Sidang Paripurna atau Dewan Administratif Legislatif (CAL).</p> <p>Komisi Pengawasan dan Pengendalian Politik tidak dapat menjadi anggota komisi lain, CAL, atau Komite Etik, dengan masa jabatan dua tahun, tidak dapat dipilih kembali secara berturut-turut, dan tidak boleh menjadi pihak yang menginterpelasi dalam proses pemakzulan politik.</p> <p>Komisi Pengawasan dan Pengendalian Politik melaporkan setiap tahun kepada Kongres Nasional dan Presiden Republik tentang kegiatan pengawasan selama tahun fiskal sebelumnya.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN								
			<ul style="list-style-type: none"> - Peran dan mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh <i>Contraloria General del Estado</i> dan <i>Comisión de Fiscalización y Control Político</i> dalam sistem pengawasan keuangan negara di Ekuador; - Jadwal atau <i>time schedule</i> pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh <i>Contraloria General del Estado</i>, serta pembahasan hasil pemeriksaan tersebut kepada Parlemen Ekuador dan <i>Comisión de Fiscalización y Control Político</i> sebagai bagian dari proses akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Ekuador; - Prosedur dan metode penelaahan yang dilakukan oleh <i>Committee on Oversight and Reform</i> terhadap laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan <i>Contraloria General del Estado</i>, dan bagaimana hasil penelahaan <i>Comisión de Fiscalización y Control Político</i> disampaikan kepada Parlemen Ekuador dan komite-komite terkait sebagai bagian dari tindak lanjut pengawasan. 									
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan DPR RI - BAKN DPR RI 	Rapat Intern dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025.	<p>Rapat Intern BAKN DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang KOREKKU, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. dengan agenda Penetapan Pergantian Pimpinan BAKN DPR RI dari Fraksi PKS.</p> <p>Kesimpulan hasil Rapat Intern antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Sdr. Amin, Ak., M.M. (A-473) sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI menggantikan Sdr. Habib Idrus Aljufri, Lc., M.B.A. (A-478). 2. Susunan Pimpinan BAKN DPR RI menjadi sebagai berikut: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1) Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">: Ketua/F.PDIP</td> </tr> <tr> <td>2) H. Andi Achmad Dara, S.E.</td> <td style="text-align: right;">: Wakil Ketua/F.Golkar</td> </tr> <tr> <td>3) Ir. H.M. Endipat Wijaya, M.M</td> <td style="text-align: right;">: Wakil Ketua/F.Gerindra</td> </tr> <tr> <td>4) Amin, Ak., M.M.</td> <td style="text-align: right;">: Wakil Ketua/F.PKS</td> </tr> </table> 	1) Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.	: Ketua/F.PDIP	2) H. Andi Achmad Dara, S.E.	: Wakil Ketua/F.Golkar	3) Ir. H.M. Endipat Wijaya, M.M	: Wakil Ketua/F.Gerindra	4) Amin, Ak., M.M.	: Wakil Ketua/F.PKS	
1) Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.	: Ketua/F.PDIP											
2) H. Andi Achmad Dara, S.E.	: Wakil Ketua/F.Golkar											
3) Ir. H.M. Endipat Wijaya, M.M	: Wakil Ketua/F.Gerindra											
4) Amin, Ak., M.M.	: Wakil Ketua/F.PKS											

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			5) Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si : Wakil Ketua/F.Demokrat	
3.	BAKN DPR RI	Rapat Intern dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025.	TERTUTUP.	
4.	BPKP RI	RDP dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025.	TERTUTUP.	
5.	BPKP RI	RDP dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025.	<p>Rapat Dengar Pendapat BAKN DPR RI dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dipimpin oleh Ketua BAKN DPR RI, Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M. dengan agenda acara penjelasan BPKP terkait Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus-kasus Korupsi.</p> <p>Kesimpulan hasil RDP antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penjelasan BPKP terkait perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus-kasus korupsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Audit PKKN dilaksanakan atas permintaan aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK) untuk mendukung pembuktian dugaan korupsi, khususnya Pasal 2 dan 3 UU PTPK. Fokus utama BPKP adalah menghitung kerugian keuangan negara, bukan jenis kerugian lainnya. Kerugian negara dapat timbul dalam bentuk, antara lain: pengeluaran kekayaan negara yang seharusnya tidak dikeluarkan, pengeluaran kekayaan negara lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku, penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima, dan hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku. Audit PKKN oleh BPKP berperan penting dalam tahap penyidikan kasus korupsi dengan menitikberatkan pada perhitungan kerugian keuangan 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>negara secara objektif dan berbasis bukti. Karena kompleksitas kasus dan keterbatasan bukti, audit dilakukan secara fleksibel dan kontekstual, serta sering melibatkan ahli agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.</p> <p>2. Konsepsi tentang pengembalian kerugian negara tidak akan pernah sama dengan jumlah kerugian negara yang terjadi.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ASPIRASI MASYARAKAT

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja (BAM)	Kunjungan Kerja ke Pekanbaru, Riau dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Juli 2025 dalam rangka Perlindungan Hak Hidup Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.	CATATAN: <ol style="list-style-type: none">1. Kunjungan Kerja BAM DPR ke Riau berawal dari adanya penyampaian aspirasi masyarakat ini pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BAM DPR RI tanggal 2 Juli 2025;2. BAM DPR RI berharap akan adanya langkah konkret dan solusi dari Pemerintah Daerah atas permasalahan yang terjadi di Kawasan Nasional Tesso Nilo (TNTN).3. Masyarakat telah mendiami TNTN sudah sejak 10-15 tahun lalu dan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Fasilitas publik turut berdampak seperti sekolah, tempat keagamaan dan lain-lain yang merupakan tempat pertemuan masyarakat setempat. Sandang pangan masyarakat juga harus diperhatikan.4. Negara menjamin hak masyarakat atas kelangsungan hidupnya;5. Kehadiran BAM DPR RI untuk melihat secara langsung masyarakat berdampak dari TNTN;6. Mempertanyakan mengenai upaya pemutusan aliran listrik oleh Satgas PKH;7. Hasil kunjungan kerja akan ditindak lanjuti kepada kementerian dan AKD terkait;8. Lebih lanjut hasil Kunjungan Kerja ini akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI dan AKD terkait serta Pemerintah sebagai masukan dan pertimbangan dalam pembahasan Pelaksanaan kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Provinsi Riau.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Kunjungan Kerja (BAM)	Kunjungan Kerja ke Cibinong, Bogor terkait Penataan Status Tanah Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kab. Bogor dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Juli 2025.	CATATAN: <ol style="list-style-type: none">1. Kunjungan Kerja BAM DPR ke Kabupaten Bogor berawal dari adanya penyampaian aspirasi masyarakat ini pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BAM DPR RI tanggal 2 Juli 2025.2. Terkait dengan permasalahan yang terjadi di Sukawangi dan berbagai daerah di Indonesia, BAM DPR RI ingin memastikan bahwa penyelesaian masalah harus dengan prinsip menguntungkan semua pihak.3. Terkait dengan penataan kawasan hutan, kita perlu melihat UU 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, di mana Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia, dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakatnya. UU ini juga menekankan tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya konservasi, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup di sekitar kawasan konservasi.4. Untuk itu BAM DPR RI memandang bahwa pemerintah telah memiliki niat baik untuk meningkatkan fungsi hutan dan mendayagunakan hutan sesuai peruntukan dan kebutuhannya bagi Masyarakat secara berkelanjutan. Namun, di dalam implementasinya tentu menemui tantangan dan kendala di masing-masing wilayah. Ada banyak persoalan terkait tata kelola, penguasaan, dan kepemilikan di wilayah hutan. Tantangan tersebut juga menyiratkan tumpang tindihnya kepemilikan lahan individu, lahan pedesaan, atau kelompok dengan lahan negara yang masuk ke dalam peta kawasan hutan negara oleh Pemerintah. Klaim kawasan hutan negara yang sudah masuk, tentu yang saat ini telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, pertambangan, atau perkebunan yang tersebar di wilayah Pulau Jawa.5. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor di mana sekitar 1.800 Ha tanahnya telah diklaim masuk wilayah hutan oleh Kementerian Kehutanan. Dalam	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>perkembangannya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Republik Indonesia Cq. Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SP.DIK.07/PPK/PPNS/05/2025 pada tanggal 15 Mei 2025, kepada 6 orang warga Desa Sukawangi.</p> <p>6. Ada keresahan dan ketakutan warga terkait aksi Kementerian Kehutanan tersebut, karena dianggap dapat mengacam kelangsungan hidup masyarakat desa yang telah terbentuk sejak tahun 1980-an.</p> <p>7. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, terdapat sekitar 20-30 desa yang masuk ke dalam Kawasan kehutanan khususnya di wilayah Kabupaten Bogor saja, dan lebih dari 25.000 desa hutan di seluruh Indonesia.</p> <p>8. Kementerian Kehutanan tidak boleh merujuk pada regulasi tahun 1927, di mana saat itu Indonesia belum ada. Jika merujuk pada waktu tersebut, maka hampir semua kawasan di Indonesia ini adalah hutan. Sebaliknya, harus merujuk pada UU terkait kehutanan setelah Indonesia merdeka, agar ada prinsip keadilan bagi masyarakat.</p> <p>9. Pemerintah perlu duduk bersama untuk melihat dari penetapan hutan di tahun 1996, berapa ha yang ada di Desa Sukawangi dan bagaimana luasan yang ada saat ini. Hal ini perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaian antara luasan penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan dengan dengan luasan kawasan desa.</p> <p>10. Terkait dengan SK Kemenhut menyangkut Desa Sukawangi, saat ini telah ada 6 tersangka, dan ada 2.000 lagi yang bisa jadi tersangka, karena potensi sanksi pidana. Hal ini perlu dibahas secara serius, karena ini menyoal hak dasar warga negara.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>SARAN / REKOMENDASI</p> <p>Berdasarkan kunjungan kerja yang dilakukan, BAM DPR RI memberikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAM DPR RI merekomendasikan adanya pertemuan lanjutan dengan DPR, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya dalam rangka merumuskan penyelesaian terkait masalah ini agar tidak berlarut-larut. 2. Perlu dilakukan pertemuan lanjutan dengan kementerian dan lembaga terkait baik dengan skema diskusi kelompok terpumpun atau sejenisnya dalam rangka merumuskan penyelesaian persoalan sebagaimana dimaksud. 3. Mendorong kepada Kementerian Kehutanan agar lebih banyak lagi melibatkan perwakilan dari berbagai unsur dalam pembentukan tim penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud. 4. Mendorong kepada Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan untuk menghindari penggunaan kalimat-kalimat yang membuat resah masyarakat terkait dengan permasalahan di kawasan hutan. 5. Perlu melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait penyelesaian permasalahan desa hutan sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Kehutanan RI. 	
3.	Kunker ke Inggris	Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Inggris dalam rangka menghimpun masukan dan meninjau langsung model pengelolaan asprasi masyarakat	Inggris dikenal sebagai negara parlemen modern dan dijuluki sebagai <i>The Mother of Parliaments</i> . Inggris dinilai berhasil membangun dan menjalankan sistem parlemen yang efektif, yang kemudian menjadi acuan bagi banyak negara lain. Melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis dan prosedur parlementer yang mapan, Inggris mampu merespons isu-isu sosial dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Parlemen Inggris terdiri atas dua kamar, yakni <i>House of Lords</i> dan <i>House of Commons</i> . <i>House of Commons</i> adalah kamar parlemen yang anggotanya dipilih langsung oleh publik di Inggris. Jumlahnya mencapai 650 anggota. Di sinilah para anggota parlemen	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dilaksanakan pada tanggal 15-21 Juli 2025.	<p>membahas isu-isu politik penting dan mengajukan serta membahas rancangan undang-undang. Sebagai bagian penting dari sistem politik Inggris, <i>House of Commons</i> berperan dalam mengawasi kerja pemerintah, membahas dan mengesahkan undang-undang, serta memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan pajak. Sebagian besar pekerjaan legislatif dilakukan melalui komite yang terdiri dari 10 hingga 50 anggota, yang bertugas mengkaji secara mendalam kebijakan pemerintah, rancangan undang-undang, hingga isu-isu ekonomi. Mereka menyerap aspirasi publik melalui kegiatan di daerah pemilihannya. Aktivitas tersebut memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen, serta menjadi kanal formal bagi penyerapan aspirasi yang dilakukan secara terjadwal dan terstruktur. Keterlibatan anggota parlemen dalam berbagai komite juga memungkinkan mereka mendalamai isu-isu publik secara tematik dan substantif. Sementara itu, <i>House of Lords</i> merupakan kamar yang anggotanya ditunjuk. Mereka tidak menjadi representasi konstituen dan kebanyakan dari mereka bukan anggota partai. Mereka berperan sebagai badan peninjau dan pengimbang terhadap rancangan undang-undang dan kebijakan. Mereka mempertajam kebijakan publik melalui peran pengawasan dan pembahasan undang-undang secara mendalam.</p> <p>Parlemen Inggris mengembangkan e-petisi sebagai kanal bagi masyarakat untuk mengajukan isu atau tuntutan. Masyarakat pun bisa mengirimkan email. Input dari masyarakat yang masuk ke parlemen akan dibahas. Parlemen menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Martin (2025), pemrakarsa petisi menjadi penggerak utama dalam membangun koneksi antara masyarakat dan parlemen, bukan hanya hanya melalui mekanisme formal seperti Komite Petisi. Sistem tersebut memungkinkan terbukanya akses berkelanjutan ke sumber daya dan dukungan dari anggota parlemen bahkan setelah proses formal selesai.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	-	<i>Focus Group Discussion</i> membahas Desa Masuk Kawasan Hutan: Menata Ulang Tata Ruang dan Keadilan Agraria dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Juli 2025.	<p>Catatan:</p> <p>BAM DPR RI terhadap paparan yang disampaikan oleh para narasumber, BAM DPR RI memberikan tanggapan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Konservasi lingkungan sangat penting dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kehidupan. Namun, penegakan kemanusiaan dan perlindungan terhadap rakyat harus dikedepankan. Oleh karena itu, BAM DPR RI memandang, ketika terjadi benturan regulasi yang mengatur kepentingan lingkungan dan manusia, maka yang harus didahulukan adalah kepentingan manusia.2. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan cenderung menggunakan hukum kehutanan produk kolonial tahun 1926 dalam menangani masalah kehutanan sehingga menimbulkan banyak kekacauan. Oleh karena itu, BAM DPR RI meminta agar pemerintah konsisten menggunakan regulasi kehutanan baru sebagai produk Indonesia merdeka.3. Pangkal dari problem tumpang tindih dan silang sengkarut desa di kawasan hutan salah satunya adalah mekanisme penunjukkan kawasan hutan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang Undang. Undang-Undang tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi di mana frasa "ditunjuk dan/atau" dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.4. Berbagai kebijakan dan langkah Kementerian Kehutanan cenderung menciptakan problem ketatanegaraan dengan terjadi kekacauan status kawasan hutan. Sertifikat yg dikeluarkan oleh kementerian ATR/BPN secara mendadak dihilangkan kekuatannya oleh Kementerian Kehutanan. Kementerian Dalam Negeri pun juga kewalahan dengan langkah Kementerian Kehutanan terkait keberadaan desa yang telah disahkan.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kementerian kehutanan juga bermasalah dengan kementerian Transmigrasi mengenai para transmigrasi yang sudah bermukim yang kemudian di gusur karena masuk kawasan hutan. Oleh karena itu, BAM DPR RI meminta Kementerian Kehutanan segera melakukan evaluasi atas kesalahan kebijakan dan langkah selama ini.</p> <p>5. Konflik agraria melibatkan ribuan orang, sehingga penyelesaiannya harus mempertimbangkan hak-hak mereka atas tanah. Oleh karena itu, BAM DPR RI meminta kepada semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat untuk melakukan mediasi demi kepentingan bersama. Mediasi diharapkan dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak di mana negara hadir untuk melindungi rakyatnya.</p> <p>6. Masalah kehutanan dan agraria ini adalah masalah multi-sektor. Sementara selama ini berbagai K/L tidak sinkron dan bahkan memiliki kebijakan yang bertabrakan. Oleh karena itu, BAM DPR RI mengharapkan adanya harmonisasi antar kementerian untuk mengatasi kebijakan yang tumpang tindih dan mencari solusi yang menyeluruh. Diharapkan dari semua pihak ada sebuah koordinasi yang berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya.</p> <p>7. Penunjukan kawasan hutan belum memiliki kekuatan hukum tetap sebelum adanya penetapan tata batas. Di Tesso Nilo Riau ada desa yang sudah berdiri sejak tahun 1800, sedangkan TNTN baru ditetapkan menjadi kawasan hutan secara sah pada tahun 2014. Maka desa-desa tersebut harus dilepaskan dari kawasan hutan karena telah ada bahkan sebelum Indonesia berdiri. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan sangat serius, karena menyangkut konsistensi negara terhadap keputusannya.</p> <p>8. Selain persoalan sejarah desa, baik di Tesso Nilo dan Bogor, negara juga telah membangun berbagai infrastruktur desa melalui dana desa. Namun, ternyata lahan yang dibangun tersebut berada di dalam kawasan hutan. Situasi ini terjadi di seluruh Indonesia yang membutuhkan penanganan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>cepat. BAM DPR RI meminta <i>road map</i> penyelesaian persoalan harus sangat jelas. Sejak tahun 2009 Kementerian Kehutanan sudah mendata ada 27.000 desa, tapi sekarang malah bertambah, bukan malah berkurang.</p> <p>9. Bawa beberapa Desa di wilayah 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan yang masuk dalam TNTN terdapat 7 Desa dan 14 Dusun dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Desa Lubuk Kembang Bunga yang berdiri tahun 2015, terdiri dari 4 Dusun (Toro Jaya, Kuala Renangan, Toro Palembang dan dusun Bawah Kenayang); b. Desa Air Hitam yang berdiri 18 Maret tahun 1978, terdiri dari 2 dusun (Tahe Jaya dan Logas Makmur); c. Desa Bagan Limau yang berdiri 15 April 2008, terdiri dari 3 Dusun; d. Desa Lubuk Batu Tinggal Kabupaten Indragiri Hulu yang berdiri di abad ke 18 sekitar tahun 1700-an, terdiri dari 1 Dusun (Pondok Kampeh) merupakan Desa tertua di Taman Nasional Tesso Nilo; e. Desa Kusuma (Kalam Pasir) yang berdiri tahun 1960, terdiri dari 2 Dusun (Toro Makmur dan Bukit Horas); f. Desa Pangkalan Gondai yang berdiri tahun 1991, terdiri dari 1 Dusun (Pelabi Jaya); g. Desa Segati yang berdiri tahun 1999, terdiri dari 1 Dusun (Mamahan Jaya). <p>SARAN/REKOMENDASI</p> <p>Setelah melalui diskusi yang cukup dinamis, <i>Focus Group Discussion</i>, BAM DPR RI telah mengambil resume sebagai cacatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Kementerian dan Lembaga terkait dalam permasalahan konflik agraria telah bersepakat dan menyetujui 3 (tiga) hal yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Semua masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik dalam kawasan hutan sebelum ditetapkan kawasan hutan harus dikeluarkan; b. Semua lahan transmigrasi dalam kawasan hutan harus dikeluarkan dari kawasan hutan; 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. Semua desa yang masuk dalam kawasan hutan harus dikeluarkan dalam kawasan hutan;</p> <p>2. BAM DPR RI perlu mempelopori penyelesaian masalah konflik agraria ini secara fokus dan serius dengan melibatkan berbagai komisi terkait di DPR RI yang membidangi kehutanan, pertanahan dan tata ruang, desa, transmigrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan.</p> <p>3. BAM DPR RI mendesak kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan bersama lintas-sektor dalam rangka menyelesaikan persoalan agraria ini secara komprehensif dan tuntas, termasuk mempercepat penyusunan <i>one map policy</i>.</p> <p>4. BAM DPR RI meminta semua pihak terkait untuk memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan <i>judicial review</i> mengenai status kawasan hutan yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.</p> <p>5. BAM DPR RI akan menyampaikan rekomendasi kepada kepada Komisi terkait untuk memperjuangkan dan mengawal kebijakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Komis V DPR RI agar semua lahan transmigrasi yang berada dalam kawasan hutan harus dilepaskan dari kawasan hutan.b. Komisi II DPR RI agar semua desa yang berada di kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri harus dilepaskan dari kawasan hutanc. Komisi II DPR RI agar semua sertifikat yang keluar sebelum penetapan kawasan hutan, harus dilepaskan dari kawasan hutan.d. Komisi IV DPR RI agar meninjau kembali mekanisme penetapan kawasan hutan sebagai pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>mengenai status kawasan hutan, khususnya putusan nomor 45/PUU-IX/2011, yang menegaskan bahwa penunjukan kawasan hutan oleh pemerintah bersifat deklaratif, bukan konstitutif. Ini berarti, suatu wilayah yang baru ditunjuk sebagai kawasan hutan belum memiliki kekuatan hukum tetap sebagai kawasan hutan sebelum melalui proses penetapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>e. Komisi XIII DPR RI agar pemerintah dan Komnas HAM melaksanakan rekomendasi pertemuan nasional mengenai konflik agraria di Taman Nasional Tesso Nilo pada tahun 2016 yang merekomendasikan untuk mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan melakukan mediasi sebagai solusi konflik.</p>	
